



**Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi**

Jl. Borobudur No 4, Jakarta, 10320, Indonesia, Tel. +62(0)21-398 99 777; [office@demos.or.id](mailto:office@demos.or.id)

Jl. Merak No 46 D, Neusu, Banda Aceh, Tel. +62(0)651-635010; [officeaceh@demos.or.id](mailto:officeaceh@demos.or.id)

Laporan Eksekutif – 30 April 2007

**MASALAH-MASALAH dan PILIHAN-  
PILIHAN DEMOKRASI ACEH**

*"MENUJU DEMOKRASI BERMAKNA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA"*

***Tim Peneliti***

Asmara Nababan (direktur)

Olle Tournquist (supervisor akademis)

Antonio Pradjasto (manajer program)

Agung Wijaya (koordinator)

Gufan Ibnu Iyasa (koordinator data)

Juanda M. Djamal (ACSTF), Budi Arianto (JKMA), Asiah (KontraS Aceh), Ferry Yuniver,  
21 peneliti lapangan

dengan kontribusi oleh

Azwir, Donnie Edwin, Eko Maju Saputra, Meta Andrya, Heru K. S.W, dan Otto Syamsudin Ishak

***Bekerja sama dengan***

Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF), Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), Jaringan  
Komunikasi Masyarakat Adat Aceh (JKMA), KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Saree School Aceh,

***Didukung oleh***

Kedutaan Norwegia untuk Indonesia

# Daftar Isi

	halaman
<b>DAFTAR ISI</b>	1
<b>BAGIAN SATU</b>	
1. Pendahuluan	2
2. Demokrasi Seperti Apa yang Dinilai, dan Bagaimana?	3
3. Penilaian dari Bawah	6
4. Hasil-Hasil dan Temuan-Temuan Utama	7
<b>BAGIAN KEDUA</b>	
5. Masyarakat Sadar Politik Aceh	
5.1. Minat, Pemahaman, dan Pilihan Politik	
5.2. Politik dan Perempuan	
6. Identitas Orang Aceh	
7. Demokrasi kembali hadir dan institusi minimal telah tersedia, diantara potensi ancaman militerisme	
7.1. Kebebasan dan Instrumen Demokrasi Non-formal sebagai Modal Politik	
7.2. Kebebasan dan Instrumen Demokrasi Formal Baru sebagai Modal yang Penting	
7.3. Masalah-Masalah Demokratisasi di Tingkat Lokal	
7.4. Potensi Ancaman Militerisme	
8. Bahaya Kolusi Modal dan Birokrasi	
9. Aktor Utama dan Demokrasi	
<b>BAGIAN TIGA</b>	
10. Kesimpulan	
I. Potensi tinggi dari masyarakat Aceh untuk berpolitik dan preferensi partai politik lokal sebagai pilihan ekspresi politik	
II. Kuatnya identitas sebagai orang Aceh	
III. Demokrasi kembali hadir dan institusi minimal telah tersedia, diantara potensi ancaman militerisme	
IV. Ancaman kolusi kekuasaan modal, birokrasi, dan partai politik terhadap sendi-sendi demokrasi	
V. Aceh didominasi oleh aktor-aktor politik dan pelembagaan organisasi massa yang lemah	
<b>BAGIAN EMPAT</b>	
11. Lampiran	

# BAGIAN I

## 1. Pendahuluan

Laporan ini merupakan temuan-temuan awal dari penelitian mengenai masalah dan pilihan demokrasi berbasis hak asasi manusia di Aceh pasca nota kesepahaman damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Laporan ini juga menyajikan analisis berbagai temuan yang dilakukan dalam berbagai kategori wilayah menggunakan hasil pemilihan kepala daerah secara langsung di Aceh. *Pertama*, yang mencakup pemilihan gubernur di tingkat propinsi, yakni (a) wilayah di mana pasangan Irwandi-Nazar menang dan (b) wilayah di mana pasangan Irwandi-Nazar kalah; *kedua*, mencakup pemilihan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota, meliputi (c) di mana pasangan INDEPENDEN<sup>1</sup> menang, dan (d) wilayah di mana pasangan dari partai politik nasional menang.

Salah satu dinamika penting yang menandai proses demokrasi di Aceh pasca nota kesepahaman damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka adalah bergesernya pendulum politik, dari politik sentral ke politik lokal. Sentralisme kekuasaan yang selama empat dekade berpusat di Jakarta menjadi pudar oleh proses desentralisasi politik. Sebaliknya, lokalisasi politik berlangsung secara meluas dan menyebar di seluruh pelosok Aceh. Hal ini pada gilirannya memberi peluang semakin terbentuknya ruang-ruang politik baru di tingkat lokal.

Penciptaan ruang politik lokal baru secara *legal* diakui dalam UU Pemerintahan Aceh yaitu pada Bab XI pasal 75 tentang pembentukan partai politik lokal. Lebih dari itu pasal 89 menentukan bahwa partai politik lokal dapat menjadi peserta pemilihan umum di tingkat lokal. Ini sesungguhnya merupakan tantangan besar bagi penggiat demokrasi di Aceh di tengah suasana transisi demokrasi. Pasalnya, jika proses ini tidak cukup dimanfaatkan, maka sebagaimana pengalaman daerah lainnya di Indonesia, desentralisasi politik justru menjadi sarana bagi terjadinya desentralisasi oligarki di Aceh; yaitu sebuah situasi dimana arena percaturan politik lokal dikuasai oleh pembajak demokrasi, sebagai akibat pengaruh mereka yang kuat dalam berbagai *domain*, juga karena penguasaan mereka yang hampir tanpa kontrol terhadap berbagai jenis sumber kekuasaan.

Fenomena itulah yang mendorong kami untuk melakukan penelitian ini, dengan mengembangkan kerangka kerja penelitian yang pernah kami lakukan pada tingkat

---

<sup>1</sup> Pasangan calon independen yang menang dalam Pilkada pada 11 Desember 2006 adalah pasangan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mereka menang di 7 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati/walikota di Aceh. Melihat daerah dimana mereka menang di tingkat lokal adalah penting karena: (a) GAM merupakan actor politik penting dalam proses demokrasi yang telah memenangkan pilkada di 7 kabupaten/kota dan tingkat propinsi. (b) Keterlibatan GAM dalam pilkada dilakukan melalui jalur 'independen' yaitu mekanisme pemilihan yang kandidatnya tidak ditentukan oleh partai politik.

nasional. Sebuah kerangka kerja untuk menilai demokrasi dari bawah serta menggabungkan sejumlah teori dan pengalaman dari studi-studi terhadap institusi dan gerakan sosial-politik.<sup>2</sup> Wawancara mendalam dilakukan terhadap 199 aktivis berpengalaman dan reflektif di seluruh kabupaten/kota di Aceh, dengan menekankan pada dinamika situasi, kondisi, dan konstekstual kekinian Aceh.

Penelitian ini sendiri menelusuri berbagai masalah dan pilihan demokratisasi yang secara umum terjadi dalam proses politik lokal di Aceh. Disamping itu, membandingkan berbagai respon dari para penggiat demokrasi di berbagai wilayah. Penelitian ini menelusuri berbagai perbedaan dan kesamaan konteks demokrasi lokal dengan kecenderungan umum pada tingkat Aceh.

## 2. Demokrasi Seperti Apa yang Dinilai, dan Bagaimana?<sup>3</sup>

Jalan yang biasa dilakukan dalam masyarakat transisional menuju demokrasi adalah melalui negosiasi elite dan pembentukan institusi dari atas. Hal ini pada gilirannya menciptakan berbagai persoalan representasi. Termasuk di dalamnya bagaimana rakyat biasa, terutama kaum pro-demokrasi bisa terintegrasi dalam politik, memperbaiki dan menggunakan institusi demokrasi.

Seperti pada penelitian tingkat nasional sebelumnya, penelitian ini menggunakan demokrasi bermakna berbasis hak asasi manusia. Pemahaman paling lazim tentang “bermakna” adalah fungsional. Dalam hal ini berbagai instrumen demokrasi berbasis hak asasi manusia mungkin tidak sempurna, namun masyarakat luas setidaknya harus melihat bahwa instrumen-instrumen konkrit tersebut dalam konteks mereka adalah masuk akal, dalam usaha mereka untuk mengendalikan dan mempengaruhi hal-hal yang menurut mereka merupakan perhatian bersama.

Kesepakatan umum yang diterima oleh para pakar tentang demokrasi adalah sistem dimana rakyat mengontrol urusan-urusan publik atas dasar kesetaraan politik.<sup>4</sup> Menurut para pakar, demokrasi mensyaratkan seperangkat prinsip umum: hak dan kesempatan bagi semua orang untuk *berpartisipasi*, *otorisasi* bagi para wakil dan pejabat, *keterwakilan* berbagai arus opini masyarakat dan komposisi sosial masyarakat – selain harus terus menerus *responsif* terhadap opini dan kepentingan masyarakat dan *bertanggung jawab* (secara langsung atau tidak langsung) kepada para warga negara atas apa yang mereka lakukan. Akhirnya, sementara kesetaraan berlaku dalam semua prinsip tersebut, *solidaritas* antara warga negara dan mereka yang berjuang untuk demokrasi juga

<sup>2</sup> Lihat “Menjadikan Demokrasi Bermakna”, Demos, 2005, Bab 1

<sup>3</sup> Diringkas dari “Menuju Demokrasi yang bermakna”, Demos, 2005, Bab I.

<sup>4</sup> Lihat David Beetham, *Democracy and Human Rights*, Oxford: Polity Press, 1999 dan Beetham, D., Bracking, S., Kearton, I., and Weir, S., *International IDEA Handbook and Democracy Assessment*, London, Newyork, kluwer Law International, 2002.

merupakan hal yang mendasar. Maka, hampir semua atau malah semua dari prinsip-prinsip umum tersebut memerlukan *hak asasi manusia*.<sup>5</sup> Antara demokrasi dan hak asasi, yang satu merupakan syarat tak terelakan (*sine qua non*) bagi yang lain.

Prinsip-prinsip mendasar ini membutuhkan seperangkat instrumen dalam berbagai tingkatan *kebijakan* yang berlaku cukup universal. Instrumen-instrumen demokrasi itu diharapkan mendorong (1) kewarganegaraan yang setara, kepastian hukum, keadilan, hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak sosial ekonomi dalam kebutuhan mendasar;<sup>6</sup> (2) pemerintahan yang representatif.; (3) masyarakat sipil yang berorientasi demokratis termasuk bentuk-bentuk partisipasi masyarakat lainnya. Dalam hal ini Beetham et al. (2002) mengidentifikasi sekitar 85 instrumen semi-universal. Kami, merevisi dan menyempitkannya menjadi 40 (lampiran 1). Kami juga memandang penting melihat kaitan antara *demos* yang ditentukan secara resmi dan bagaimana orang-orang mengidentifikasi diri mereka dalam urusan publik<sup>7</sup>

Agar bisa dianggap bermakna, instrumen-instrumen tersebut tidak boleh hanya ada; namun mereka harus juga memiliki kinerja yang cukup baik, yang bukan hanya berfungsi secara terbatas tapi juga dalam lingkup yang cukup luas.<sup>8</sup> Sehubungan dengan hal ini, penelitian juga menanyakan kinerja dan cakupan dari hak-hak dan institusi-institusi<sup>9</sup> demokrasi di atas. Disamping itu, karena banyak hak dan institusi yang tidak muncul dan bekerja dengan sendirinya, maka perlu diketahui sejauh mana masyarakat luas (dan bukan hanya elite) bersedia dan mampu mendorong serta menggunakannya.

Melalui cara inilah kami menganalisis dinamika demokrasi dan demokratisasi. Sebuah cara yang melampaui model pemetaan kaku yang banyak menjadi kerangka penilaian arusutama demokrasi. Persoalannya bagaimana melihat kapasitas warga negara tersebut. Hal ini berkaitan dengan (a) keberadaan secara efisien di berbagai bidang dan lingkup negara dan masyarakat,<sup>10</sup> (b) politisasi efektif terhadap masalah dan kepentingan, (c) mobilisasi masyarakat yang efektif, dan (d) strategi yang efektif untuk mendorong dan menggunakan instrumen-instrumen demokrasi. Sebagai implikasinya para aktor memiliki

<sup>5</sup> Hak semua manusia untuk mendapatkan keadilan dan kebebasan, dan hak-hak sosial ekonomi mendasar lainnya tanpa memandang etnik, ras, agama dan latar belakang sosial.

<sup>6</sup> Adalah hal yang intrinsik dalam demokrasi yang berarti bahwa seseorang bisa bertahan hidup dan sedikitnya memiliki otonomi.

<sup>7</sup> Hal ini berkaitan dengan pertanyaan: bagaimana orang-orang yang bekerjasama dengan para informan kami mengidentifikasi diri mereka dalam urusan publik.

<sup>8</sup> Gabungan cakupan yang luas dan kinerja yang buruk karena sumber daya dan kekuasaan institusional yang kurang serupa dengan apa yang dikenal sebagai “demokrasi tanpa pilihan.”

<sup>9</sup> Hak dan institusi demokrasi dalam laporan ini selanjutnya disingkat dengan H/I saja.

<sup>10</sup> Secara singkat, bisa dibedakan antara lingkup (dan medan-medan di dalamnya) yang terkait dengan negara, usaha, unit-unit mandiri (seperti koperasi) dan ranah-ranah privat dan publik yang ada di dalam dan antara mereka. Ranah/lingkup publik bisa didefinisikan sebagai suatu kerangka institusi, forum dan praktik-praktik publik dan terbuka – berbeda dari kerangka yang privat dan tertutup – bagi para warga negara untuk merundingkan, bernegosiasi dan bekerjasama. Suatu lingkup publik tidak harus dikelola oleh negara atau pemerintah. Serupa dengan itu, “masyarakat sipil” dalam bentuk organisasi warga negara bisa berada di semua titik dalam spektrum privat-publik. Lingkup-lingkup dan medan-medan itu bisa terletak dalam tingkat pusat dan lokal, dan juga dalam kaitan-kaitan di antara mereka; yang dibentuk berdasarkan logika wilayah atau sektor. Di dalam ruang yang tersedia dan di medan-medan tersebut, bisa terdapat ruang yang terbuka bagi berbagai aktor.

kemampuan untuk membaca, menyesuaikan diri dan menggunakan instrumen demokrasi secara nyata. Studi ini juga memasukkan variabel struktur kesempatan dan tiga dimensi mendasar dari studi dominasi oleh Bourdieu, yaitu sumber kekuasaan, transformasi kekuasaan dan habitus.<sup>11</sup> Untuk lebih jelasnya, kami memunculkan empat belas pertanyaan (boks 1) yang digunakan untuk menangkap variabel inti yang diperlukan untuk menilai masalah dan pilihan demokrasi bermakna berbasis hak asasi.

Boks 1	
14 pertanyaan utama untuk menilai demokrasi berbasis HAM dari bawah	
Faktor-faktor intrinsik	
- identitas politik/ <i>demos</i>	1. Bagaimana anggota masyarakat memahami dan menentukan pilihan-pilihan sikap serta minat politiknya?
	2. Bagaimana anggota masyarakat mengidentifikasi diri mereka dalam hal-hal publik (sebagai warga daerah – atau sebagai anggota komunitas lokal, religius atau etnis)?
- kinerja instrumen	3. Bagaimana kinerja 40 instrumen demokrasi utama baik formal maupun informal, dan apakah keberadaannya mendorong atau menghambat demokrasi pasca MoU Helsinki?
- lingkup instrumen	4. Bagaimana cakupan geografis dan permasalahan 40 instrumen demokrasi utama baik formal maupun informal, dan apakah kondisinya mereka membaik, memburuk, atau sama saja dengan masa sebelum MoU Helsinki?
- hubungan aktor dengan instrumen	5. Bagaimana para aktor utama mengaitkan diri dengan 40 instrumen demokrasi (mendorong dan mempergunakan, hanya mempergunakan, kadang-kadang mempergunakan, mengabaikan/menyalahgunakan), dan berkaitan dengan instrumen yang kuat atau lemah?
	6. Apa yang dianggap pro dan kontra oleh para aktor pro-demokrasi berkaitan dengan 40 instrumen demokrasi tersebut?
	7. Di lingkup apa saja dalam ranah politik yang luas ini terdapat para aktor?
	8. Dengan cara apa para aktor mempolitikasi masalah, kepentingan dan ide?
	9. Bagaimana para aktor memobilisasi dukungan masyarakat/melibatkan mereka dalam politik?
	10. Strategi apa saja yang diterapkan aktor dalam menjalani, atau mengabaikan sistem politik?
Kaitan dengan kondisi-kondisi non-intrinsik	
- kapasitas aktor untuk membaca, menyesuaikan diri dan menggunakan kondisi struktural dan lain-lainnya	11. Bagaimanakah kesempatan politik struktural bagi para aktor?
	12. Apa sumber politik yang digunakan aktor?
	13. Bagaimana aktor berusaha untuk mengubah kekuatan-kekuatan tersebut menjadi kekuasaan, legitimasi dan pengaruh politik?
	14. Nilai-nilai, ide-ide dan pengalaman-pengalaman apa yang memandu para aktor secara sadar maupun tidak sadar dalam kegiatan publik mereka?

Selanjutnya kami paparkan darimana sumber-sumber informasi terbaik kami kumpulkan, sebelum akhirnya tiba pada hasil yang perlu dilakukan di Aceh untuk memperdalam proses demokrasi.

<sup>11</sup> Habitus adalah ilai-nilai, pemikiran-pemikiran dan pengalaman-pengalaman yang dalam refleksi para informan dianggap terpenting, juga bagi para aktor dominan, secara sadar maupun tidak sadar.

### 3. Penilaian dari Bawah

Sumber informasi diperoleh melalui wawancara yang pertanyaannya diformulasikan sedemikian rupa sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih mencerminkan pengalaman dan usaha masyarakat luas dalam konteks-konteks lokal dibanding yang berorientasi metropolitan dan elitis. Caranya, bukan dengan melalui jajak pendapat kepada ‘rakyat kebanyakan’. Kami berfokus pada para pakar yang telah bekerja dan berpengalaman dalam pemajuan demokrasi, kami sebut dengan informan. Tentu saja, persepsi tetaplah penting, meskipun interpretasi *posmodern* menolaknya. Dengan cara ini kami beralih dari keterbatasan perspektif para pakar metropolitan yang selama ini biasa dimintai pendapat dan komentarnya, tetapi sayangnya yang mereka katakan seringkali jauh dari kenyataan sebenarnya atau berbeda dengan fakta di lapangan.

Metode *participatory appraisal* bukan pula pilihan kami. Kami lebih memilih untuk menyusun sebuah skema penilaian yang terstruktur secara teoritik sekaligus melakukan konsultasi dengan para pakar. Namun, kami menentukan kriteria para pakar tersebut di antara para aktivis lokal yang selama ini terbukti reflektif, mengakar serta telah berpengalaman dalam upaya-upaya mereka untuk mempromosikan demokrasi, dalam empat belas bidang masalah utama kegiatan demokrasi.<sup>12</sup> Para informan tersebut kemudian diberi sejumlah pertanyaan tentang standar instrumen demokrasi, serta kapasitas para aktor utama menghubungkan dirinya dengan instrumen-instrumen tersebut. Semua wawancara dilakukan oleh para peneliti lapangan yang dapat mengaitkan pertanyaan-pertanyaan umum dengan kondisi lokal.

Sementara itu, kerangka penilaian kami telah menghasilkan kuesioner dengan lebih dari 200 pertanyaan. Atas kerjasama yang baik dengan para peneliti lapangan dan para informan, hasilnya tidak seburuk yang dibayangkan. Para informan, di tengah kesibukan mereka, menunjukkan pemahaman dan kesabaran yang tinggi dengan kuesioner yang panjang dan wawancara yang menyita waktu. Dari target 210 informan di seluruh Aceh dengan rata-rata sepuluh informan di setiap Kabupaten/Kota di Aceh, informan yang berhasil diwawancarai dan kami anggap layak untuk dianalisis datanya mencapai 199.

Langkah berikutnya adalah dengan melaksanakan *training* bagi para peneliti lapangan di 21 kabupaten/kota di Aceh. Para peneliti lapangan telah memainkan peran penting dalam mendukung pengetahuan kami, termasuk dalam mengidentifikasi proses-proses strategis di kabupaten/kota yang terkait dengan berbagai lingkup masalah dan telah memberikan

---

<sup>12</sup> Penggalan empat belas bidang masalah utama tersebut diperoleh melalui *Focus Group Discussion* dengan para pakar yang reflektif di Aceh. Empat bidang masalah utama kegiatan demokrasi di Aceh (1) kontrol atas tanah; (2) perburuhan; (3) kaum miskin perkotaan; (4) hak asasi manusia; (5) gerakan melawan korupsi atau gerakan mendukung “tata pemerintahan baik”; (6) usaha-usaha untuk mendemokratisasi sistem kepartaian; (7) usaha mendorong pluralisme dan rekonsiliasi keagamaan serta etnik; (8) perbaikan dan demokratisasi pendidikan; (9) promosi profesionalisme sebagai bagian tatapemerintahan yang baik dalam sektor publik dan privat; (10) kebebasan, kemerdekaan dan kualitas media; (11) promosi kesetaraan jender dan perspektif feminis; (12) perbaikan keterwakilan alternatif pada tingkat lokal; (13) usaha untuk mendorong organisasi massa berbasis kepentingan; dan (14) usaha untuk mendorong isu-isu pembangunan yang berkelanjutan. Mereka berasal dari seluruh Aceh.

saran dan bantuan kepada kami dalam mendekati para informan untuk diwawancarai. Informasi tambahan dan uji kualitas juga dilakukan oleh para pakar senior dan aktivis yang reflektif.

## 4. Hasil-Hasil dan Temuan-temuan utama

### 4.1. Pengantar

Temuan penelitian ini diolah dari 199 penggiat demokrasi di Aceh yang berasal dari 21 Kabupaten/Kota. Lebih dari itu mereka menjawab pertanyaan secara kontekstual – lokal dan bukan tentang negara secara keseluruhan, sehingga mungkin meningkatkan kualitas informasi mereka. Data-data itu kemudian diolah berdasarkan lima (5) kategori daerah yaitu (a) umum – gambaran aceh secara keseluruhan, (b) daerah-daerah dimana Irwandi Y dan Muh. Nazar memenangkan pilkada (c) dimana mereka kalah, (d) daerah-daerah dimana calon independen memenangkan pemilihan di tingkat kabupaten/kota (e) dan di mana partai politik nasional menang dalam pemilihan di tingkat kabupaten/kota.

Pembagian ini dilakukan karena beberapa pertimbangan berikut. *Pertama*, Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah proses politik yang sangat penting bagi demokratisasi dan kesinambungan perdamaian di Aceh. Perjuangan kepentingan beralih dari penggunaan kekerasan bersenjata menjadi cara demokratis. *Kedua*, GAM merupakan aktor yang sangat besar pengaruhnya dalam percaturan politik di Aceh. Disamping memenangkan pemilihan gubernur, GAM juga berhasil meraih suara terbanyak di 7 kabupaten/kota pada Pilkada tanggal 11 Desember 2006 lalu. *Ketiga*, dimungkinkannya jalur ‘independen’, yaitu jalur yang dapat dilakukan kandidat tanpa membutuhkan dukungan partai politik tertentu, untuk menang.

### 4.2. Lima kesimpulan utama

Secara umum, penelitian ini menunjukkan lima kesimpulan utama mengenai masalah-masalah dan pilihan-pilihan pengembangan demokrasi berbasis hak asasi manusia di Aceh agar menjadi bermakna:

- I** Potensi tinggi dari masyarakat Aceh untuk berpolitik dan preferensi partai politik lokal sebagai pilihan ekspresi politik.
- II** Kuatnya identitas kewargaan Aceh.
- III.** Demokrasi kembali hadir dan institusi minimal telah tersedia, diantara potensi ancaman militerisme
- IV** Ancaman kolusi kekuasaan modal, birokrasi, dan partai politik terhadap sendi-sendi demokrasi.



- V. Aceh didominasi oleh aktor-aktor politik dan pelebagaan organisasi massa yang kurang terorganisir secara politis.

Temuan-temuan pokok sementara ini ditemukan dari berbagai kesimpulan yang spesifik sebagaimana diuraikan pada bagian berikut. Analisis data berfokus pada gejala umum, namun akan terdapat pula catatan-catatan penting mengenai hal-hal yang spesifik mengenai lingkup-lingkup masalah di wilayah-wilayah kategoris.

## BAGIAN II

### 5. Masyarakat Sadar Politik

Sepanjang pemerintahan rezim Orde Baru, bisa dikatakan tidak pernah ada pemilu yang berlangsung secara demokratis. Pemerintah efektif mengintervensi penyelenggaraan pemilu untuk mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari 30 tahun. Dibandingkan daerah lain, intervensi pemerintah dalam pemilu di Aceh tampak lebih fenomenal. Daerah ini merupakan basis terkuat Partai persatuan Pembangunan (PPP), seperti tercermin dalam perolehan suara partai ini selama pemilu 1977 dan 1982. Hanya berkat tekanan yang kuat dari rezim Orde Baru, Golkar berhasil menjadi pemenang dalam pemilu-pemilu selanjutnya.

Pasca jatuhnya Soeharto, rakyat Aceh mulai mendapatkan kembali keberanian mereka yang selama ini sirna di bawah tekanan dan ancaman laras senjata. Kalangan mahasiswa dan aktivis LSM mengampanyekan seruan bagi sebuah referendum di Aceh. Isu referendum semakin menguat dengan munculnya tuntutan agar rakyat Aceh memboikot Pemilu 1999. Alasannya, pemilu 1999 sama sekali tidak memberikan solusi bagi rakyat Aceh yang selama era Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1989–1998 menjadi sasaran pelanggaran HAM. Kampanye yang dilakukan oleh beberapa aktivis ini terbukti cukup efektif. Hanya sekitar 40 persen pemilih yang memberikan suara dalam pemilu tersebut. Ini merupakan angka golongan putih (Golput) yang tertinggi di Indonesia pada Pemilu 1999.<sup>13</sup>

Seperti belajar dari pengalaman Pemilu 1999, Pemilu legislatif dan presiden yang berlangsung di Aceh pada 2004 kemudian dilaksanakan dengan ketat dalam bayang-bayang status darurat militer. Rezim baru kembali memanipulasi pemilu di Aceh. Daftar daftar pemilih sementara tidak pernah tercantum di papan-papan pengumuman kantor kepala desa. Daftar calon anggota legislatif (caleg) atau partai politik (parpol) peserta pemilu tidak mudah ditemukan. Militer mengampanyekan stigma, “Rakyat Aceh yang tidak mendukung Pemilu adalah GAM. Maka ia akan dituduh makar.” Hasilnya, saat pencoblosan 5 Juli 2004, nyaris tidak ada rakyat Aceh yang berani melakukan aksi boikot. Tak mengherankan, jika pada pemilu 1999 Aceh tercatat sebagai daerah dengan Golput yang sangat besar, maka Pemilu 2004, tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu di Aceh merupakan yang terbesar di Indonesia, mencapai 95 persen.

Dengan menyimak pasang surut sikap politik rakyat Aceh menarik untuk mengkaji perubahan tingkah laku politik rakyat Aceh seiring dengan perubahan politik yang sedang berlangsung di daerah ini. Oleh karena itu, survei kami juga menanyakan beberapa hal mengenai tingkah laku politik tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ditujukan guna menggali lebih dalam perihal pemahaman, minat, bahkan sampai dengan pilihan-pilihan politik rakyat Aceh.

---

<sup>13</sup> Data temuan Forum LSM Aceh pada Pemilu 1999

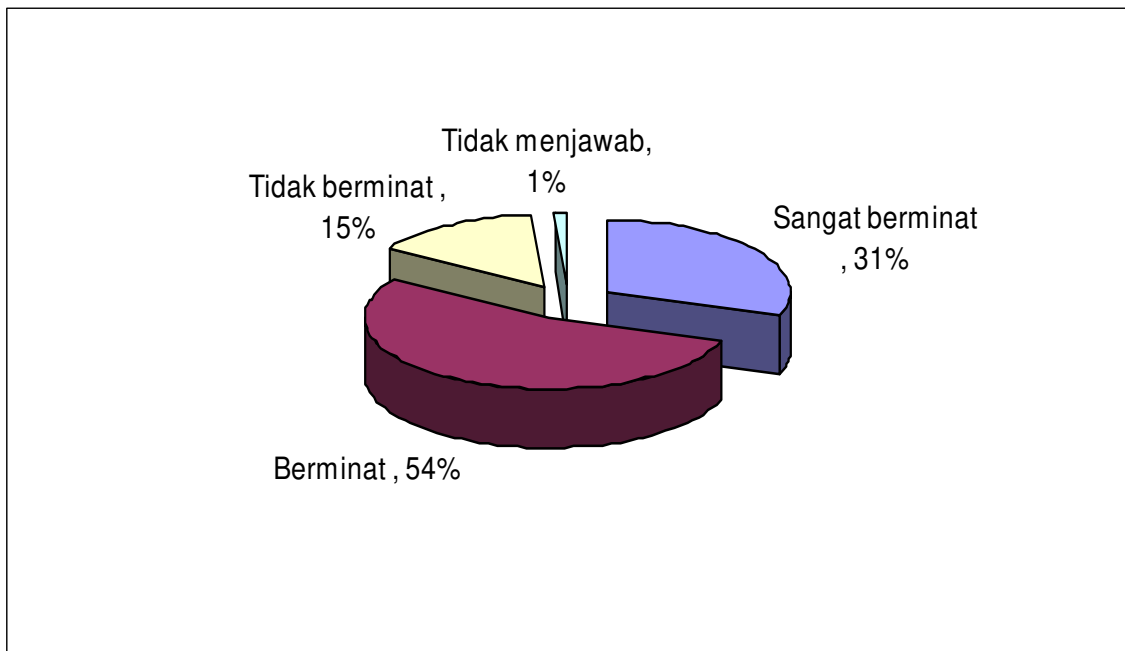
### 5.1. Minat, Pemahaman, dan Pilihan Politik

Demokrasi pada dasarnya adalah kontrol rakyat (*people*) yang setara secara politik atas urusan publik (*public affairs*). Untuk itu demokrasi akan bermakna jika rakyat bukan saja sadar politik tapi juga memiliki kapasitas politik yang memadai. Dalam hal ini, di antaranya adalah kapasitas untuk menentukan urusan publik. Tentu saja banyak aspek yang harus dibicarakan untuk dapat menilai kapasitas politik warga negara. Sebelum masuk pada perkara itu, adalah penting untuk memahami sejauh mana rakyat Aceh telah mengalami proses politisasi sebagaimana ditunjukkan oleh minat dan pemahaman mereka terhadap politik, di samping tentu saja pilihan-pilihan politik mereka.

Pengalaman di negara-negara lain membuktikan bahwa demokratisasi terancam gagal justru ketika prosesnya tidak diiringi oleh politisasi masyarakat yang memadai. Dalam kondisi demikian, institusi-institusi demokrasi menghadapi bahaya pembajakan oleh elit-elit dominan yang tidak mempunyai kepentingan mempromosikan demokrasi. Dalam kasus Aceh, kekhawatiran semacam itu tampaknya cukup mendapatkan jawaban. Temuan penelitian ini menunjukkan cukup tingginya potensi masyarakat Aceh untuk tumbuh menjadi sebuah "*politicised society*"<sup>14</sup>

Grafik 1

**Seberapa besar minat orang-orang yang terlibat di dalam gerakan yang Anda geluti di daerah ini terhadap politik?**



<sup>14</sup> Mengacu pada istilah *politicized society* yaitu masyarakat yang bukan saja memiliki pengetahuan dan kesadaran politik akan tetapi juga 'siap sedia' (*available*) terlibat dalam ranah politik.

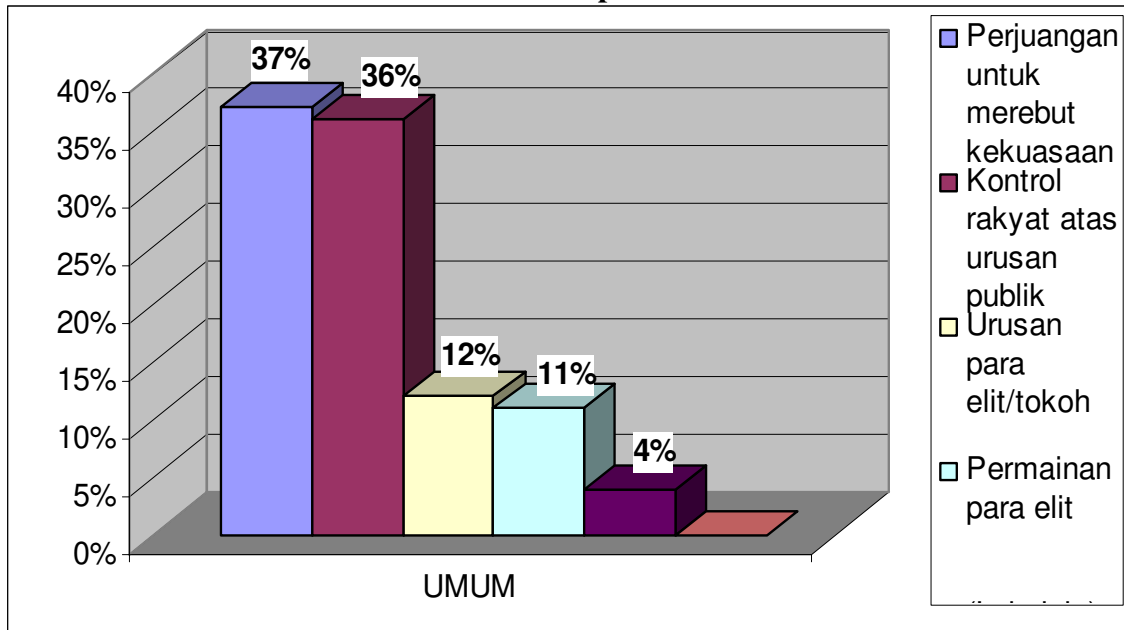
Secara umum temuan kami menunjukkan bahwa sebesar 54% rakyat Aceh berminat pada politik dan 31% bahkan menyatakan sangat berminat pada politik. Artinya sebesar 85% rakyat Aceh memiliki minat terhadap politik. Dalam hal minat politik itu tidak ada perbedaan yang signifikan di antara wilayah-wilayah dimana pasangan Irwandi-Nazar menang dan partai politik menang. Di wilayah Irwandi-Nazar menang, 81% menyatakan berminat atau sangat berminat terhadap politik. Angka yang tidak jauh berbeda juga diekspresikan di daerah-daerah dimana partai nasional menang, yakni sekitar 88%.

Bukan hanya minat terhadap politik yang positif, melainkan juga pemahaman masyarakat terhadap politik. Bagi kebanyakan masyarakat, politik dipahami bukan sekedar urusan atau permainan para elit atau tokoh politik, juga bukan sekedar “urusan perut”. Sebaliknya, politik bagi mereka dipahami dalam perspektifnya yang modern dan progresif, yakni sebagai perjuangan untuk merebut kekuasaan (37%) atau sebagai kontrol rakyat atas urusan publik (36%). Temuan umum inipun tak berbeda kondisinya dengan semua wilayah kategoris yang dicakup oleh penelitian ini.

Namun sebuah catatan menarik perlu dikemukakan. Di daerah-daerah dimana pasangan Irwandi-Nazar dan calon dari INDEPENDEN menang terdapat kecenderungan yang cukup kuat untuk memandang politik dalam kerangka sebuah “perjuangan untuk merebut kekuasaan” (36%). Artinya, keinginan untuk mengganti rezim dan menukarnya dengan kekuatan politik baru cenderung tampak lebih kuat di daerah-daerah tersebut ketimbang di daerah lain.

Grafik 2

**Bagaimana orang-orang yang terlibat di dalam gerakan yang Anda geluti di daerah ini memahami politik?**



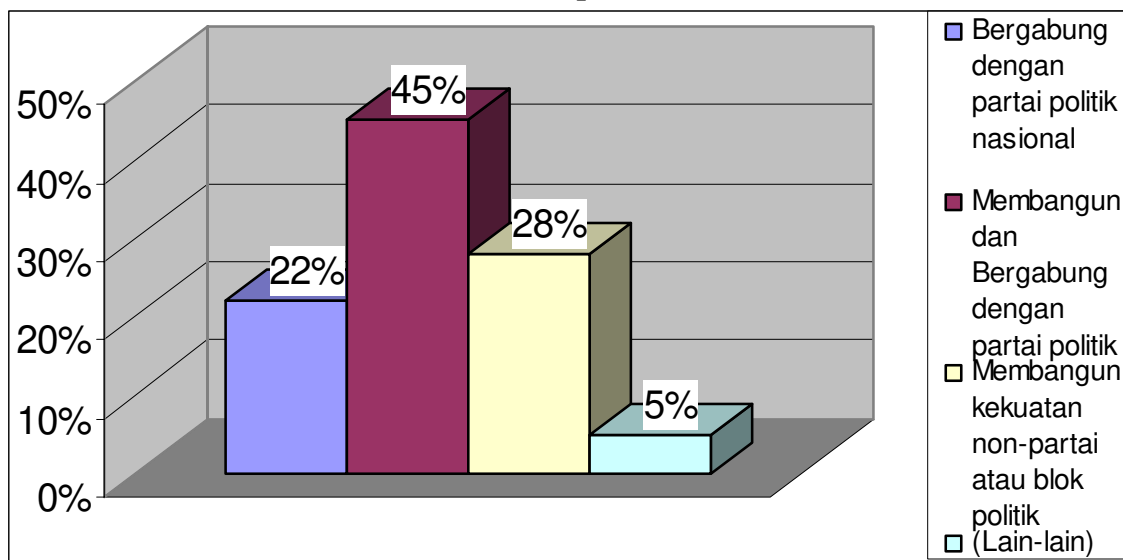
Paralel dengan kuatnya keinginan untuk melakukan perubahan politik, mayoritas informan menyatakan bahwa masyarakat setempat memandang partai lokal sebagai pilihan yang tepat jika mereka (kelak) tertarik terlibat dalam proses politik. Kecenderungan semacam itu tidak berbeda baik di daerah Irwandi-Nazar dan INDEPENDEN menang atau kalah. **Tabel 10 menjelaskan** hal tersebut.

Yang agak mengejutkan adalah kecenderungan untuk membangun dan bergabung dengan partai lokal ternyata jauh lebih kuat (70%) di daerah-daerah dimana partai politik nasional memenangkan pilkada 2006 dibanding di daerah dimana kandidat INDEPENDEN menang. Ini semakin membuktikan bahwa partai politik nasional sesungguhnya tidak populer di Aceh, juga di wilayah dimana partai politik nasional menang. Kemenangan partai politik nasional mungkin terkait dengan beragam alasan namun yang jelas bukan karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik nasional tinggi. Bahkan sebaliknya di daerah-daerah tersebut, pilihan untuk bergabung dengan partai nasional tampak amat kecil (6%). Alasan paling logis yang bisa dikemukakan adalah karena masyarakat setempat tidak menilai para kandidat INDEPENDEN sebagai pilihan alternatif yang tepat untuk melakukan perubahan politik pada sebuah situasi transisi politik saat ini. Oleh karena itu dalam pilkada lalu mereka memilih untuk menunda melakukan perubahan pilihan politik kepartaian mereka hingga pemilu berikutnya saat di mana partai-partai politik lokal baru akan makin tersedia cukup banyak.

Pada sisi lain, besarnya kecenderungan untuk membangun dan bergabung dengan sebuah partai lokal mengisyaratkan tumbuhnya optimisme politik di kalangan masyarakat untuk menggunakan mekanisme formal demokrasi (partai) sebagai cara untuk mempengaruhi proses politik. Mereka memang selama ini telah kehilangan kepercayaan terhadap partai politik, tetapi tidak terhadap kerangka demokrasi baru di Aceh. Ini tentu saja sebuah sinyal positif bagi masa depan demokratisasi di Aceh.

Grafik 3

**Apabila seseorang di gerakan yang Anda geluti di wilayah ini tertarik untuk melibatkan diri di dalam proses politik, jalur apakah yang paling tepat untuk ditempuh?**

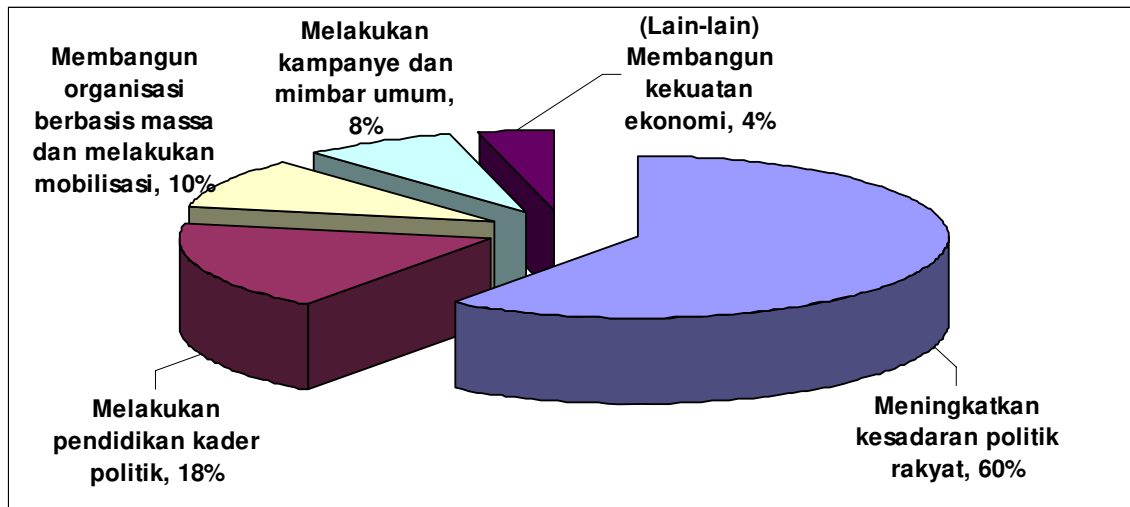


Kendati demikian, upaya membangun kekuatan non-partai atau blok politik tampak tetap menjadi alternatif yang cukup banyak dipilih oleh berbagai elemen di dalam masyarakat. Terdapat 28% informan yang menilai bahwa orang-orang di lingkungan mereka memilih jalur non partai atau blok politik untuk mempengaruhi proses politik. Ini berarti jalur non partai merupakan pilihan keterlibatan politik kedua terbanyak pada semua kategori wilayah.

Sementara menyangkut metode partisipasi politik publik, data kami menunjukkan bahwa mayoritas informan (sekitar 60%) mengklarifikasi bahwa "meningkatkan kesadaran politik" merupakan metode yang paling banyak dipilih dalam upaya memperbaiki partisipasi politik publik, kecuali di Kabupaten/Kota dimana partai politik menang. Metode ini tidak populer di daerah-daerah dimana partai politik menang. Di daerah-daerah ini, "pendidikan kader politik" serta "kampanye dan mimbar umum" untuk membangun kapasitas politik publik menjadi pilihan utama guna memperbaiki partisipasi politik publik. Hanya 23% dari informan pada kategori daerah tersebut yang menyatakan peningkatan kesadaran politik warga sebagai pilihan metode.

Grafik 4

**Metode apakah yang efektif untuk membangun kapasitas dan pemahaman politik masyarakat di wilayah Anda untuk meningkatkan partisipasi politik?**



Terdapat kecenderungan pada semua kategori wilayah untuk mengabaikan pengembangan organisasi berbasis massa sebagai cara yang efektif guna membangun kapasitas politik. Kecenderungan ini pada satu sisi memperkuat dugaan bahwa partai-partai politik nasional tetap konservatif dalam merespon perubahan politik di Aceh. Selama ini, metode "pendidikan kader" atau "kampanye/mimbar umum" merupakan metode konvensional yang paling populer di kalangan partai atau organisasi-organisasi massa bentukan pemerintah. Kekurangan inovasi politik yang dipertontonkan oleh partai-

partai politik selama periode kampanye Pilkada yang lalu –yang menonjolkan mimbar umum – tampaknya merupakan refleksi dari pilihan metode mereka.

## 5.2. Politik dan Perempuan

Dalam sejarah Aceh, keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah sesuatu yang istimewa. Pada masa lalu, cukup banyak perempuan Aceh yang memainkan peran penting dalam politik mulai dari *uleebalang* hingga panglima perang, bahkan ratu. Para informan penelitian ini menilai sekitar 60% perempuan Aceh berminat terhadap politik. 12% di antaranya bahkan dinyatakan sangat berminat. Kecuali di wilayah dimana INDEPENDEN menang, tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kategori daerah lainnya dalam hal tingginya minat kaum perempuan terhadap politik. Tabel di bawah menyajikan informasi tentang minat kelompok perempuan terhadap politik.

**Tabel 1: Minat kelompok perempuan terhadap politik**

Sejauh mana minat kaum perempuan di daerah ini terhadap politik?	UMUM	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPENDEN	PARTAI POLITIK
Sangat berminat	12%	13%	10%	6%	15%
Berminat	47%	44%	51%	37%	48%
Tidak berminat	39%	41%	34%	54%	33%
Tidak menjawab	3%	2%	5%	3%	4%

Namun sayangnya minat kelompok perempuan Aceh terhadap politik ini, tidak diimbangi dengan upaya mendorong partisipasi kaum perempuan di dalam kancah politik yang lebih kongkrit. Upaya-upaya yang ada selama ini barulah pada tingkatan wacana ditengah dinamika perubahan sosial politik Aceh saat ini. Contoh yang paling jelas adalah nasib gerakan bagi representasi perempuan di Aceh. Tuntutan para aktivis perempuan setempat agar mewajibkan 30% kuota bagi perempuan dalam kepengurusan partai politik lokal terkesan sekedar menjadi komoditas politik kalangan politisi lokal.

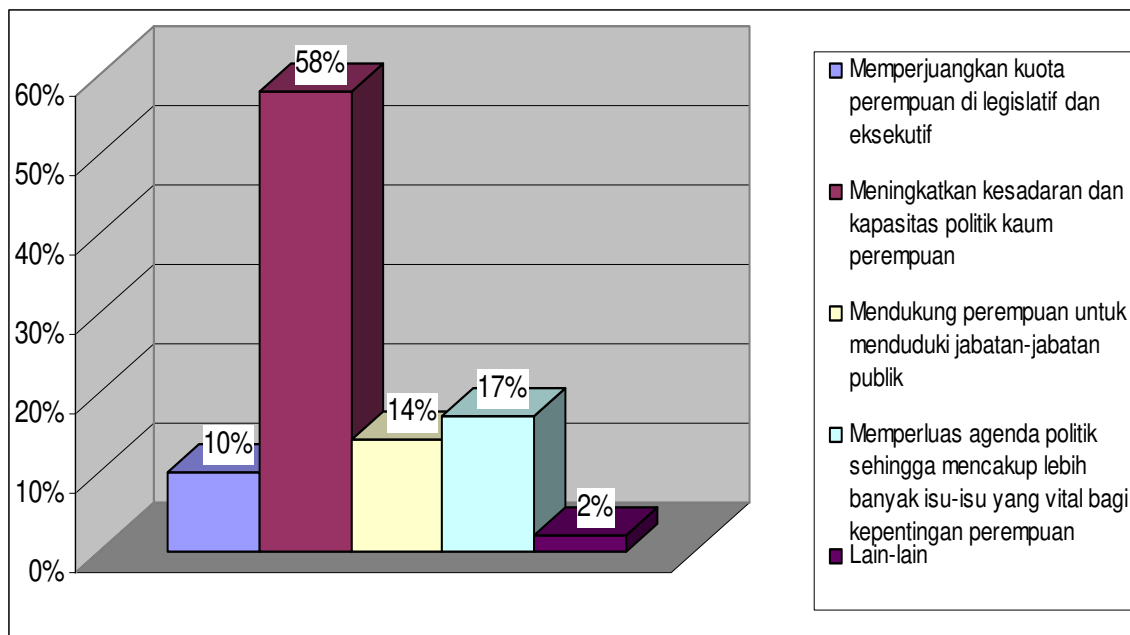
Kondisi demikian juga dikonfirmasi temuan penelitian kami. Isu politik perempuan terkesan hanya menjadi semacam komoditi politik di Aceh, yang berhenti di tingkat jargon. Walau lebih dari separuh informan pada semua kategori wilayah yang dicakup penelitian ini sangat memandang penting peningkatan kesadaran dan kapasitas politik kaum perempuan sebagai upaya untuk mendorong perbaikan partisipasi politik kaum perempuan, sedikit sekali (10%) yang sepakat untuk memberi kuota bagi perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif.

Seperti ditampilkan pada grafik 5, mayoritas informan tampaknya juga tidak memandang penting memberi dukungan pada kaum perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Secara umum hanya sebesar 14% saja yang setuju untuk mendukung perempuan menduduki jabatan-jabatan publik dengan kecenderungan dukungan yang semakin melemah di daerah-daerah dimana Irwandi-Nazar dan kandidat pasangan INDEPENDEN menang (masing-masing 5% dan 7%). Sebaliknya, dukungan yang besar (33%) bagi

perempuan menduduki jabatan publik datang dari daerah-daerah dimana partai politik nasional meraih suara terbanyak dalam pilkada lalu.

Kecenderungan yang agak bertolak belakang tersebut menjelaskan kemampuan partai politik – dibandingkan dengan kalangan INDEPENDEN – untuk bernegosiasi dengan kelompok-kelompok masyarakat. Salah satu bentuk negosiasi politik konvensional yang selama ini lazim digunakan partai politik adalah mengakomodasi kelompok-kelompok politik tertentu dengan jalan secara simbolis memberi jabatan publik pada`posisi-posisi yang tidak strategis. Oleh karena itu, tidak seperti di daerah INDEPENDEN menang hanya 1% informan dari daerah-daerah partai politik menang yang peduli akan agenda politik terkait kepentingan perempuan. Bagi informan di daerah yang disebut terakhir, negosiasi politik lebih banyak berarti “bagi-bagi” jabatan dengan tokoh dari kelompok politik yang diakomodasi.

Grafik 5  
Menurut Anda apa yang harus dilakukan untuk mendorong partisipasi kaum perempuan dalam politik?



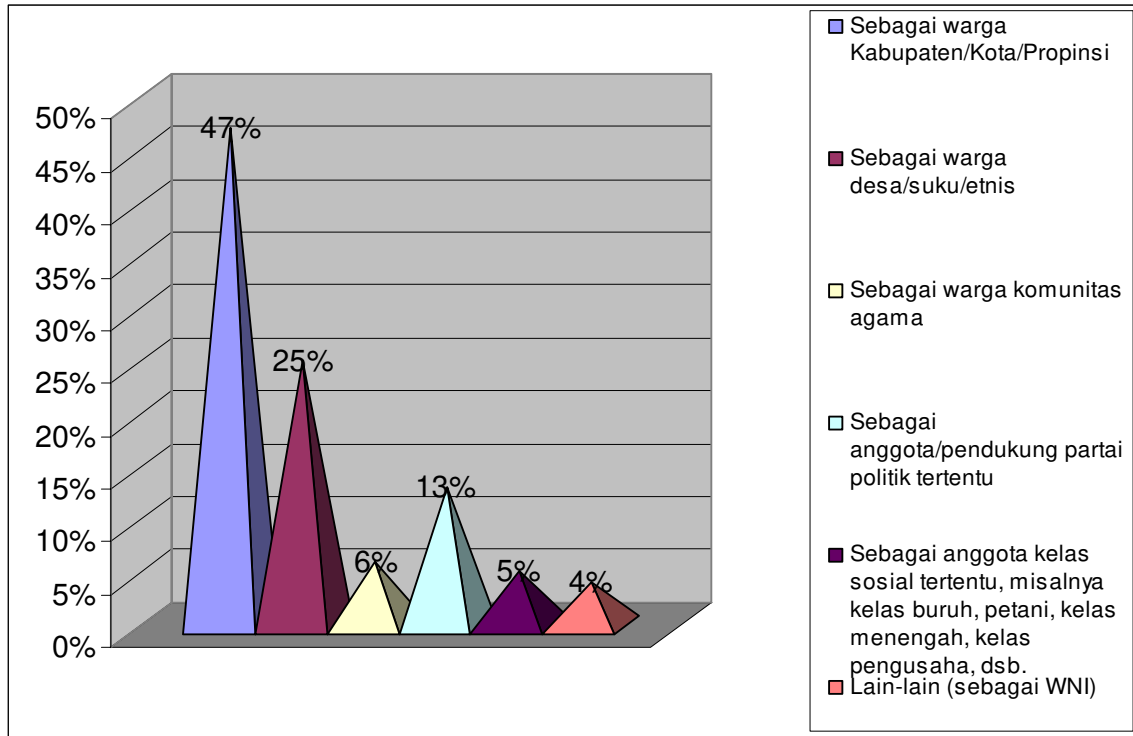
## 6. Identitas Orang Aceh

Satu prasyarat lain untuk demokrasi adalah korespondensi antara *demos* dengan bagaimana masyarakat mengidentifikasi diri dalam urusan publik, dalam hal ini kami kemudian mengaitkannya dengan isu Pilkada. Menurut para informan, sekitar 47% masyarakat yang bekerja dengan mereka cenderung mengidentifikasi diri mereka sebagai “warga Aceh” (kabupaten, kota, atau propinsi) dan 25% mengidentifikasi diri mereka



sebagai bagian dari komunitas desa/suku/etnis. Sementara itu, hanya sekitar 6% yang menyatakan masyarakat mengidentifikasi diri mereka sebagai komunitas agama

Grafik 6  
Identitas kewargaan dalam PILKADA



Kuatnya kecenderungan mengidentifikasi diri sebagai warga Aceh melampaui identitas-identitas lainnya: etnis, agama, kelas sosial, dan warga Indonesia dapat diartikan dalam beberapa cara. *Pertama*, orang Aceh lebih merasa sebagai bagian dari sebuah entitas politik yang bernama Aceh dan bukan semata-mata “suku bangsa” Aceh. *Kedua*, ini mungkin menjadi isyarat dari tumbuhnya rasionalitas politik di kalangan masyarakat setelah puluhan tahun, politik tampak sebagai sesuatu yang tidak logis.

Terdapat pola kecenderungan yang agak berbeda di antara kelompok daerah Irwandi-Nazar dan INDEPENDEN menang di satu pihak dengan daerah-daerah dimana partai politik menang. Pada kategori kelompok daerah pertama, selisih di antara mereka yang pertama-tama mengidentifikasi diri sebagai warga Aceh dan kemudian sebagai warga etnis tampak cukup besar. Artinya, kecenderungan mengidentifikasi diri sebagai warga Aceh terlihat lebih menonjol di daerah-daerah dimana INDEPENDEN menang ketimbang di kelompok daerah lainnya.

Bagaimanapun, angka-angka itu harus diinterpretasikan secara hati-hati. Persoalan pertama menyangkut identifikasi diri sebagai warga komunitas agama. Kecilnya prosentase mereka yang berpendapat warga mengidentifikasi diri sebagai bagian komunitas agama tidak otomatis dapat disimpulkan bahwa identitas agama telah merosot

di Aceh. Sebagaimana dipahami, Islam merupakan bagian integral dari identitas etnis Aceh.

Persoalan kedua terkait dengan rasionalitas politik. Kendati terlihat sinyal yang jelas bagi berkembangnya rasionalitas politik di Aceh, namun tidak bisa diinterpretasikan bahwa apa yang disebut dengan istilah “politik perkauman”<sup>15</sup> telah sama sekali hilang dari tingkah laku politik masyarakat pemilih di Aceh. Apa yang bisa kita katakan tentang hal ini adalah politik perkauman tetap merupakan faktor penting di Aceh, tetapi tidak sedominan seperti yang selama ini dibayangkan oleh para pengamat dan politisi.

Kegagalan membaca pergeseran tingkah laku politik ini diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya partai politik nasional memenangkan bursa pemilihan Gubernur dan perebutan suara untuk meraih jabatan Bupati/Walikota di beberapa daerah pada Pilkada lalu. Berbeda dengan kandidat INDEPENDEN, kampanye partai-partai, seperti di masa lalu, tetap didominasi oleh isu-isu seputar sentimen keagamaan misalnya syariat Islam.

Juga berbeda dengan kandidat INDEPENDEN, partai-partai pun tampak masih mengandalkan strategi politik berbasis perkauman yang terlihat dari cara mereka membuat kalkulasi atas pengajuan calon kandidat di dalam Pilkada. Ketimbang menawarkan program-program yang lebih realistis, partai-partai sibuk mencari titik temu asal-usul daerah, keturunan, dan suku dari kandidat yang akan mereka perjuangkan.

Temuan berikutnya yang menarik adalah mulai munculnya gejala identitas berbasis kelas (buruh, petani, dan kaum miskin kota) di Aceh, terutama di daerah-daerah dimana Irwandi-Nazar menang dan INDEPENDEN menang dalam Pilkada lalu. Bagi kalangan yang termarginalisasi baik dalam politik maupun ekonomi tersebut sebuah pesan kampanye politik yang berisikan ajakan untuk melakukan perubahan fundamental terhadap politik jelas lebih menarik minat mereka ketimbang isu-isu primordial. Pesan politik seperti itulah yang mereka tangkap dari Irwandi-Nazar dan INDEPENDEN.

## **7. Demokrasi kembali hadir dan institusi minimal telah tersedia, diantara potensi ancaman Militerisme**

Banyak orang sangat terkejut ketika mengetahui bahwa pasangan Irwandi – Nazar memenangkan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh pada tanggal 11 Desember 2006 lalu dengan hanya satu putaran saja. Prediksi para analisis politik, bahkan survei dari berbagai lembaga baik lokal, nasional, maupun internasional terbukti meleset dari hasilnya. Pasangan Irwandi-Nazar bagaikan ‘kuda hitam’ yang melaju jauh meninggalkan saingan-saingannya asal partai politik nasional.

---

<sup>15</sup> Politik perkauman adalah politik berdasarkan preferensi asal usul daerah, keturunan, suku, atau etnis seseorang.

Di luar dugaan banyak pihak, pasangan Irwandi-Nazar memenangkan suara lebih dari 2/3 jumlah kabupaten/kota di Aceh atau lebih tepatnya sebanyak 15 kabupaten/kota. Banyak analis berpendapat mengenai kemenangan fenomenal pasangan independen ini. Salah satunya berkaitan dengan digunakannya pakaian khas Aceh dalam foto pemilihan mereka. Benar tidaknya kami sendiri tidak berani berasumsi apapun selain mencoba menganalisisnya melalui penelitian yang kami lakukan ini. Kami menggali data-data dalam penelitian ini sepanjang bulan September hingga Januari 2006. Hasil analisis dalam bab ini bukan hanya akan menganalisa kemenangan Irwandi-Nazar, tapi juga akan melihat kemenangan INDEPENDEN di 7 kabupaten/kota di Aceh, sekaligus menyajikan masalah-masalah demokratisasi lokalnya di Aceh.

### 7.1 Kebebasan dan Instrumen demokrasi non formal<sup>16</sup> sebagai modal politik

Hasil penelitian kami menunjukkan di daerah-daerah dimana pasangan Irwandi-Nazar menang, kinerja Hak dan Institusi demokratik formal menyangkut aspek-aspek keterwakilan dan *rule of law* cenderung lebih buruk dibandingkan dengan di daerah-daerah dimana pasangan tersebut kalah. Ini misalnya tampak dari rendahnya kinerja hak/institusi (selanjutnya disingkat H/I) demokrasi yang berkaitan dengan kemampuan partai menjalankan pemerintahan, di kategori daerah-daerah Irwandi-Nazar menang (34%). Situasi serupa juga terjadi dengan kinerja H/I terkait dengan pengembangan akses yang setara terhadap keadilan (35%).

Hal ini mengindikasikan tingginya ekspektasi para pemilih terhadap pasangan Irwandi-Nazar untuk menyelesaikan problem-problem demokrasi yang dihadapi masyarakat selama ini. Ekspektasi dimaksud diperkuat oleh cukup tingginya kecenderungan untuk menilai baik kinerja H/I formal maupun non formal menyangkut upaya-upaya untuk mendorong proses reintegrasi (51% - 61%) dan pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol agama atau etnis oleh partai di daerah-daerah dimana pasangan Irwandi-Nazar menang (50%). Kedua H/I ini, terutama menyangkut persoalan reintegrasi setidaknya dapat menjadi salah satu faktor penting bagi kemenangan Irwandi-Nazar di wilayah-wilayah yang secara tradisional sebetulnya bukan daerah basis INDEPENDEN, seperti Aceh Tenggara, Gayo Lues, Sabang, ataupun Simeulu.

**Tabel 2 : Perbandingan Kinerja Hak-hak dan institusi-institusi yang mendorong demokrasi di wilayah pasangan Irwandi-Nazar menang dan kalah**

No.	Hak/ Institusi Demokrasi	FORMAL (MENANG)	FORMAL (KALAH)	NON-FORMAL (MENANG)	NON-FORMAL (KALAH)
1	Pemajuan Kesetaraan warga	46%	62%	41%	53%
2	Pemajuan Hak minoritas, migran, dan pengungsi	44%	64%	41%	51%

<sup>16</sup> Informan diminta merefleksikan pemikiran dan pengalamannya mengenai bagaimana implikasi berbagai peraturan formal (perda provinsi/kota/kabupaten, dan berbagai peraturan/keputusan lain yang setingkat atau lebih rendah) dan kemudian non formal (kebiasaan, konvensi, adat, nilai, norma), yang dibuat dan berlaku di daerah setempat terhadap masalah-masalah dan pilihan-pilihan demokrasi.

LAPORAN PENELITIAN TAHAP 1

3	Pemajuan <b>Hak-hak korban</b> (konflik dan bencana)	47%	59%	55%	54%
4	Pemajuan <b>Rekonsiliasi</b> dalam masyarakat	43%	48%	51%	48%
5	Pemajuan <b>Reintegrasi</b>	51%	46%	61%	43%
6	Pemajuan <b>Dukungan terhadap hukum dan perangkat HAM internasional</b>	56%	51%	53%	43%
7	Pemajuan <b>Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum.</b>	31%	38%	41%	33%
8	Pemajuan <b>Akses yang setara dan aman terhadap keadilan</b>	35%	49%	51%	48%
9	Pemajuan <b>Integritas dan independensi peradilan</b>	34%	33%	47%	39%
10	Terjaminnya <b>Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut</b>	38%	30%	46%	34%
11	Terjaminnya <b>Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat</b>	65%	57%	65%	53%
12	Terjaminnya <b>Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja</b>	63%	66%	62%	53%
13	Terjaminnya <b>Kebebasan beragama dan berkeyakinan</b>	79%	77%	78%	64%
14	Terjaminnya <b>Kebebasan menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan</b>	76%	67%	72%	66%
15	Terjaminnya <b>Kesetaraan dan emansipasi gender (perempuan)</b>	52%	64%	46%	41%
16	Terjaminnya <b>Perlindungan terhadap hak-hak anak</b>	54%	62%	55%	59%
17	Terjaminnya <b>Hak bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak, serta memperoleh jaminan sosial dan terpenuhinya semua kebutuhan dasar masyarakat</b>	44%	36%	52%	38%
18	Terjaminnya <b>Hak memperoleh pendidikan dasar</b>	57%	74%	58%	54%
19	Pemajuan <b>Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan) yang sesuai dengan kepentingan public</b>	33%	33%	35%	38%
20	Pemajuan <b>Pemilihan Umum yang bebas, jujur, dan adil</b>	71%	54%	59%	49%
21	Pemajuan <b>Pilkada yang bebas, jujur, dan adil</b>	60%	54%	64%	49%
22	Terjaminnya <b>Kebebasan membentuk partai, merekrut anggota, dan mengkampanyekan calon-calonnya</b>	57%	62%	54%	43%
23	Pemajuan <b>Kemampuan partai untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan masyarakat kepentingan publik</b>	42%	39%	40%	38%
24	Pemajuan <b>Pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol, doktrin agama atau etnis oleh partai</b>	50%	44%	43%	33%
25	Pemajuan <b>Kemandirian partai-partai dari money politics dan kepentingan yang terselubung</b>	36%	34%	44%	30%
26	Pemajuan <b>Kapasitas kontrol anggota dan simpatisan terhadap partainya, serta respon dan tanggungjawab partai terhadap konstituennya</b>	36%	41%	40%	30%
27	Pemajuan <b>Kemampuan partai menjalankan pemerintahan</b>	34%	46%	44%	30%
28	<b>Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan terpilih, pada semua tingkatan</b>	38%	36%	44%	39%
29	<b>Transparansi dan akauntabilitas birokrasi pada semua tingkatan</b>	30%	30%	40%	36%
30	<b>Desentralisasi pemerintahan</b> secara demokratis yang dianggap sesuai bagi rakyat	38%	40%	49%	36%
31	<b>Pertanggungjawaban militer dan polisi</b> kepada pemerintahan dan publik	31%	39%	30%	33%
32	<b>Kemampuan pemerintah</b> melawan milisi, premanisme, dan kejahatan terorganisir (perampokan bersenjata)	36%	49%	38%	44%
33	<b>Kapasitas pemerintah</b> untuk bebas dari pengaruh berbagai kelompok kepentingan yang kuat, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan	37%	48%	41%	36%
34	Terjaminnya <b>Kebebasan pers, seniman, dan akademisi</b>	60%	66%	55%	57%
35	Terjaminnya <b>Akses publik terhadap berbagai pandangan</b> dalam media, seni, dan dunia akademis, juga untuk merefleksikannya	56%	57%	49%	53%
36	Pemajuan <b>Partisipasi warganegara dalam organisasi-organisasi independent</b>	59%	57%	69%	61%
37	Pemajuan <b>Transparansi, akuntabel, dan demokratisnya organisasi masyarakat sipil</b>	47%	53%	57%	51%
38	Pemajuan <b>Partisipasi dan akses yang luas dari semua kelompok sosial, termasuk perempuan, terhadap kehidupan publik</b>	49%	49%	54%	46%
39	<b>Terbukanya akses dan kontak langsung</b> masyarakat terhadap layanan publik dan terhadap para wakil politik mereka	23%	43%	46%	41%
40	<b>Konsultasi pemerintah</b> kepada masyarakat, dan bila mungkin, adanya partisipasi publik secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan public	23%	53%	44%	41%

Hasil yang sama juga tampak ketika mengkaji kemenangan INDEPENDEN di 7 kabupaten/kota berkaitan dengan pemilihan Bupati/Walikota. Kondisi H/I non formalnya jauh lebih baik ketimbang H/I formal, termasuk jika dibandingkan dengan H/I non formal di daerah-daerah dimana Partai Politik nasional menang. Ini sekaligus mengkonfirmasi situasi ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap sistem politik di Aceh selama ini. Dalam konteks ini, masyarakat menempatkan INDEPENDEN sebagai alternatif.

**Tabel 3 : Kinerja hak-hak dan institusi-institusi demokrasi di wilayah pasangan INDEPENDEN menang dan Partai Politik menang**

No.	Hak/ Institusi Demokrasi	FORMAL (INDEPENDEN)	FORMAL (PARTOL)	NON-FORMAL (INDEPENDEN)	NON-FORMAL (PARTOL)
1	Pemajuan Kesetaraan warga	37%	58%	34%	47%
2	Pemajuan Hak minoritas, migran, dan pengungsi	39%	55%	36%	48%
3	Pemajuan Hak-hak korban (konflik dan bencana)	36%	55%	51%	54%
4	Pemajuan Rekonsiliasi dalam masyarakat	36%	48%	52%	46%
5	Pemajuan Reintegrasi	42%	53%	58%	52%
6	Pemajuan Dukungan terhadap hukum dan perangkat HAM internasional	49%	58%	60%	42%
7	Pemajuan Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum.	22%	39%	37%	37%
8	Pemajuan Akses yang setara dan aman terhadap keadilan	34%	43%	45%	52%
9	Pemajuan Integritas dan independensi peradilan	28%	39%	54%	39%
10	Terjaminnya Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut	37%	35%	42%	41%
11	Terjaminnya Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat	58%	68%	61%	59%
12	Terjaminnya Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja	69%	63%	64%	57%
13	Terjaminnya Kebebasan beragama dan berkeyakinan	82%	77%	78%	72%
14	Terjaminnya Kebebasan menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan	69%	74%	73%	68%
15	Terjaminnya Kesetaraan dan emansipasi gender (perempuan)	45%	62%	39%	49%
16	Terjaminnya Perlindungan terhadap hak-hak anak	49%	58%	48%	59%
17	Terjaminnya Hak bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak, serta memperoleh jaminan sosial dan terpenuhinya semua kebutuhan dasar masyarakat	28%	46%	48%	46%
18	Terjaminnya Hak memperoleh pendidikan dasar	54%	65%	51%	57%
19	Pemajuan Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan) yang sesuai dengan kepentingan publik	31%	32%	39%	33%
20	Pemajuan Pemilihan Umum yang bebas, jujur, dan adil	73%	61%	55%	55%
21	Pemajuan Pilkada yang bebas, jujur, dan adil	52%	61%	67%	55%
22	Terjaminnya Kebebasan membentuk partai, merekrut anggota, dan mengkampanyekan calon-calonnya	51%	60%	54%	48%
23	Pemajuan Kemampuan partai untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan masyarakat kepentingan publik	40%	44%	34%	42%
24	Pemajuan Pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol, doktrin agama atau etnis oleh partai	66%	40%	58%	31%
25	Pemajuan Kemandirian partai-partai dari money politics dan kepentingan yang terselubung	36%	32%	40%	37%
26	Pemajuan Kapasitas kontrol anggota dan simpatisan terhadap partainya, serta respon dan tanggungjawab partai terhadap konstituennya	28%	41%	33%	40%
27	Pemajuan Kemampuan partai menjalankan pemerintahan	39%	35%	40%	38%
28	Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan terpilih, pada semua tingkatan	36%	38%	45%	41%
29	Transparansi dan akuntabilitas birokrasi pada semua tingkatan	27%	32%	34%	38%

30	<b>Desentralisasi pemerintahan</b> secara demokratis yang dianggap sesuai bagi rakyat	31%	40%	46%	46%
31	<b>Pertanggungjawaban militer dan polisi</b> kepada pemerintahan dan publik	22%	38%	21%	40%
32	<b>Kemampuan pemerintah melawan milisi, premanisme, dan kejahatan terorganisir</b> (perampokan bersenjata)	25%	57%	24%	50%
33	<b>Kapasitas pemerintah untuk bebas dari pengaruh berbagai kelompok kepentingan yang kuat, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan</b>	28%	43%	30%	42%
34	Terjaminnya <b>Kebebasan pers, seniman, dan akademisi</b>	63%	63%	54%	56%
35	Terjaminnya <b>Akses publik terhadap berbagai pandangan</b> dalam media, seni, dan dunia akademis, juga untuk merefleksikannya	45%	63%	40%	55%
36	Pemajuan <b>Partisipasi warganegara dalam organisasi-organisasi independent</b>	49%	66%	66%	64%
37	Pemajuan <b>Transparansi, akuntabel, dan demokratisnya organisasi masyarakat sipil</b>	40%	52%	54%	53%
38	Pemajuan <b>Partisipasi dan akses yang luas dari semua kelompok sosial, termasuk perempuan, terhadap kehidupan publik</b>	37%	55%	45%	55%
39	<b>Terbukanya akses dan kontak langsung masyarakat terhadap layanan publik dan terhadap para wakil politik mereka</b>	19%	34%	43%	44%
40	<b>Konsultasi pemerintah kepada masyarakat, dan bila mungkin, adanya partisipasi publik secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan publik</b>	13%	38%	37%	43%

## 7.2. Kebebasan dan institusi-institusi demokrasi formal baru sebagai modal yang penting

Meski secara umum kinerja H/I demokratis formal buruk, terdapat 17 H/I yang telah membaik kinerjanya. H/I yang telah cukup baik atau baik kinerjanya itu mencakup kebebasan sipil dan politik, antara lain: kebebasan beragama (78%), kebebasan membentuk partai (60%), kebebasan pers (63%), dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam asosiasi-asosiasi sosial dan politik independent (58%). Kemajuan ini, bagaimanapun, menjadi modal awal bagi pembangunan demokrasi di Aceh di masa yang akan datang. Tabel di bawah menyajikan daftar H/I yang dinilai baik kinerjanya.

**Tabel 4 : Hak-hak dan institusi-institusi pada sektor formal yang berkinerja mendorong demokrasi yang cukup baik (> 51%) dan baik (> 71%) di Aceh secara umum**

Hak/ Institusi Demokrasi		Kinerja	Cakupan
1	Pemajuan <b>Kesetaraan warga</b>	54%	48%
2	Pemajuan <b>Hak minoritas, migran, dan pengungsi</b>	54%	35%
3	Pemajuan <b>Hak-hak korban</b> (konflik dan bencana)	53%	39%
4	Pemajuan <b>Dukungan terhadap hukum dan perangkat HAM internasional</b>	54%	44%
5	Terjaminnya <b>Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat</b>	61%	60%
6	Terjaminnya <b>Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja</b>	65%	57%
7	Terjaminnya <b>Kebebasan beragama dan berkeyakinan</b>	78%	73%
8	Terjaminnya <b>Kebebasan menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan</b>	72%	74%
9	Terjaminnya <b>Kesetaraan dan emansipasi gender (perempuan)</b>	58%	42%
10	Terjaminnya <b>Perlindungan terhadap hak-hak anak</b>	58%	46%
11	Terjaminnya <b>Hak memperoleh pendidikan dasar</b>	66%	57%

12	Pemajuan <b>Pemilihan Umum yang bebas, jujur, dan adil</b>	63%	59%
13	Pemajuan <b>Pilkada yang bebas, jujur, dan adil</b>	57%	57%
14	Terjaminnya <b>Kebebasan membentuk partai, merekrut anggota, dan mengkampanyekan calon-calonnya</b>	60%	57%
15	Terjaminnya <b>Kebebasan pers, seniman, dan akademisi</b>	63%	67%
16	Terjaminnya <b>Akses publik terhadap berbagai pandangan</b> dalam media, seni, dan dunia akademis, juga untuk merefleksikannya	57%	47%
17	Pemajuan <b>Partisipasi warganegara dalam organisasi-organisasi independent</b>	58%	59%

Kendati demikian, di daerah-daerah dimana pasangan Irwandi-Nazar dan kalangan INDEPENDEN menang tetap dibutuhkan perbaikan pada beberapa instrumen demokrasi terutama berkaitan dengan masalah “kesetaraan warga” (46% - 37%), “hak minoritas, migran, dan pengungsi” (44% - 39%), dan “hak-hak korban konflik dan bencana alam” (47% - 36%). Sebagaimana ditunjukkan pada **tabel 6**, khususnya di daerah-daerah dimana kalangan INDEPENDEN menang terdapat beberapa persoalan lain, yakni buruknya kinerja H/I yang dapat mendorong kesetaraan dan emansipasi gender (45%), perlindungan terhadap hak-hak anak (49%) serta masalah akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis yang berbeda (45%). Buruknya kinerja H/I pada aspek-aspek yang disebutkan itu merefleksikan persoalan-persoalan mendesak yang dihadapi pembangunan demokrasi pasca konflik di Aceh saat ini.

Karena itu, sebagian dari ujian awal bagi pembangunan demokrasi di Aceh adalah menyelesaikan dampak konflik dan bencana alam yang dialami masyarakat korban, memenuhi dan menegakan keadilan bagi para korban, serta mendorong keterbukaan akses dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Pada sisi lain, ini sekaligus menunjukkan adanya harapan yang tinggi terhadap kepemimpinan politik kalangan INDEPENDEN untuk melakukan perubahan secara cepat atas persoalan-persoalan dampak konflik dan bencana alam di daerah-daerah dimana mereka keluar sebagai pemenang dalam Pilkada yang lalu.

**Tabel 5 : Kinerja Hak-hak dan institusi-institusi demokrasi formal yang cukup baik (>51%) dan baik (>71%) di berbagai wilayah**

No.	HAK/ INSTITUSI DEMOKRASI	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPEN	PARTAI POLITIK
1	Pemajuan <b>Kesetaraan warga</b>	46%	62%	37%	58%
2	Pemajuan <b>Hak minoritas, migran, dan pengungsi</b>	44%	64%	39%	55%
3	Pemajuan <b>Hak-hak korban</b> (konflik dan bencana)	47%	59%	36%	55%
4	Pemajuan <b>Dukungan terhadap hukum dan perangkat HAM internasional</b>	56%	51%	49%	58%
5	Terjaminnya <b>Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat</b>	65%	57%	58%	68%
6	Terjaminnya <b>Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat pekerja</b>	63%	66%	69%	63%
7	Terjaminnya <b>Kebebasan beragama dan berkeyakinan</b>	<b>79%</b>	<b>77%</b>	<b>82%</b>	<b>77%</b>
8	Terjaminnya <b>Kebebasan menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan</b>	<b>76%</b>	67%	69%	<b>74%</b>

9	Terjaminnya <b>Kesetaraan dan emansipasi gender (perempuan)</b>	52%	64%	45%	62%
10	Terjaminnya <b>Perlindungan terhadap hak-hak anak</b>	54%	62%	49%	58%
11	Terjaminnya <b>Hak memperoleh pendidikan dasar</b>	57%	<b>74%</b>	54%	65%
12	Pemajuan <b>Pemilihan Umum yang bebas, jujur, dan adil</b>	<b>71%</b>	54%	<b>73%</b>	61%
13	Pemajuan <b>Pilkada yang bebas, jujur, dan adil</b>	60%	54%	52%	61%
14	Terjaminnya <b>Kebebasan membentuk partai, merekrut anggota, dan mengkampanyekan calon-calonnya</b>	57%	62%	51%	60%
15	Terjaminnya <b>Kebebasan pers, seniman, dan akademisi</b>	60%	66%	63%	63%
16	Terjaminnya <b>Akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, juga untuk merefleksikannya</b>	56%	57%	45%	63%
17	Pemajuan <b>Partisipasi warganegara dalam organisasi-organisasi independent</b>	59%	57%	49%	66%

### 7.3. Masalah-masalah demokratisasi di tingkat lokal

Terdapat cukup banyak masalah dengan kinerja H/I demokratisasi formal. Sekurangnya hal itu meyangkut persoalan jaminan keamanan bagi masyarakat (36%), *rule of law* (34%), jaminan pada standar hak ekonomi dan sosial (42%), persoalan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (30%), serta kinerja keterwakilan politik (42%). Pada semua aspek tersebut memang kondisinya tidak cukup baik. Bahkan di wilayah pasangan Irwandi-Nazar menang, keterbukaan akses dan kontak langsung masyarakat terhadap layanan publik dan terhadap para wakil politik (23%), kondisinya tampak paling buruk dibandingkan H/I lainnya juga jika dibandingkan kondisinya dengan daerah-daerah lain dimana pasangan tersebut kalah.

Demokrasi bukan sekadar cerita tentang kebebasan sipil dan politik; dan demokratisasi bukanlah sekadar proyek liberalisasi politik. Demokrasi juga mempersyaratkan (i) pemerintahan konstitusional, (ii) *rule of law*, (iii) militer yang tunduk pada supremasi sipil, (iv) pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, (v) peradilan yang bebas dan adil serta yang terpenting adalah (vi) negara yang responsif terhadap kepentingan publik dan (vii) adanya jaminan hak ekonomi, sosial, budaya bagi rakyat. Pada aspek-aspek ini, kondisinya juga masih buruk, sebagaimana terlihat pada tabel 5 yang menggambarkan situasi umum dan variasinya di wilayah pasangan Irwandi – Nazar menang dan kalah.

**Tabel 6: Kinerja Hak-hak dan institusi-institusi demokrasi di Aceh  
Yang secara umum cukup buruk (26% - 50%) buruk (<25%)**

No.	Hak/ Institusi Demokrasi	FORMAL (MENANG)	FORMAL (KALAH)	UMUM
1	Terbukanya akses dan kontak langsung masyarakat terhadap layanan publik dan terhadap para wakil politik mereka	23%	43%	29%
2	Transparansi dan akuntabilitas birokrasi pada semua tingkatan	30%	30%	30%
3	Pemajuan <b>Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan) yang sesuai dengan kepentingan public</b>	33%	33%	33%
4	Pemajuan <b>Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum.</b>	31%	38%	34%
5	Pemajuan <b>Integritas dan independensi peradilan</b>	34%	33%	35%



6	Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan terpilih, pada semua tingkatan	38%	36%	35%
7	Pertanggungjawaban militer dan polisi kepada pemerintahan dan publik	31%	39%	35%
8	Terjaminnya Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut	38%	30%	36%
9	Pemajuan Kemandirian partai-partai dari money politics dan kepentingan yang terselubung	36%	34%	36%
10	Desentralisasi pemerintahan secara demokratis yang dianggap sesuai bagi rakyat	38%	40%	38%
11	Pemajuan Kapasitas kontrol anggota dan simpatisan terhadap partainya, serta respon dan tanggungjawab partai terhadap konstituennya	36%	41%	38%
12	Pemajuan Kemampuan partai menjalankan pemerintahan	34%	46%	39%
13	Pemajuan Akses yang setara dan aman terhadap keadilan	35%	49%	40%
14	Kemampuan pemerintah melawan milisi, premanisme, dan kejahatan terorganisir (perampokan bersenjata)	36%	49%	41%
15	Terjaminnya Hak bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak, serta memperoleh jaminan sosial dan terpenuhinya semua kebutuhan dasar masyarakat	44%	36%	42%
16	Pemajuan Kemampuan partai untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan masyarakat kepentingan public	42%	39%	42%
17	Kapasitas pemerintah untuk bebas dari pengaruh berbagai kelompok kepentingan yang kuat, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan	37%	48%	42%
18	Pemajuan Rekonsiliasi dalam masyarakat	43%	48%	44%
19	Pemajuan Partisipasi dan akses yang luas dari semua kelompok social, termasuk perempuan, terhadap kehidupan public	49%	49%	50%

Sementara itu di wilayah INDEPENDEN menang, ada lima H/I yang kondisinya buruk yakni menyangkut konsultasi pemerintah kepada masyarakat dan partisipasi publik secara langsung dalam pembuatan kebijakan (13%), terbukanya akses masyarakat pada pelayanan publik (19%), kepatuhan pejabat terhadap hukum (22%), pertanggungjawaban militer dan polisi pada pemerintah (22%), dan kemampuan pemerintah melawan milisi, premanisme, dan kejahatan terorganisir (25%).

**Tabel 7: Kinerja hak-hak dan institusi-institusi demokrasi di wilayah INDEPENDEN menang – yang buruk (10% - 25%) dan cukup buruk (26% - 50%)**

No.	Hak/ Institusi Demokrasi	INDEPENDEN
1	Konsultasi pemerintah kepada masyarakat, dan bila mungkin, adanya partisipasi publik secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan public	13%
2	Terbukanya akses dan kontak langsung masyarakat terhadap layanan publik dan terhadap para wakil politik mereka	19%
3	Pemajuan Kepatuhan pejabat pemerintah dan pejabat publik terhadap hukum.	22%
4	Pertanggungjawaban militer dan polisi kepada pemerintahan dan public	22%
5	Kemampuan pemerintah melawan milisi, premanisme, dan kejahatan terorganisir	25%
6	Transparansi dan akauntabilitas birokrasi pada semua tingkatan	27%
7	Pemajuan Kapasitas kontrol anggota dan simpatisan terhadap partainya, serta respon dan tanggungjawab partai terhadap konstituennya	28%
8	Pemajuan Kapasitas kontrol anggota dan simpatisan terhadap partainya, serta respon dan tanggungjawab partai terhadap konstituennya	28%
9	Terjaminnya Hak bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak, serta memperoleh jaminan sosial dan terpenuhinya semua kebutuhan dasar masyarakat	28%
10	Pemajuan Integritas dan independensi peradilan	28%
11	Desentralisasi pemerintahan secara demokratis yang dianggap sesuai bagi rakyat	31%
12	Pemajuan Good Corporate Governance ( tata kelola perusahaan) yang sesuai dengan kepentingan public	31%
13	Pemajuan Akses yang setara dan aman terhadap keadilan	34%
14	Pemajuan Hak-hak korban (konflik dan bencana)	36%
15	Pemajuan Rekonsiliasi dalam masyarakat	36%

16	Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan terpilih, pada semua tingkatan	36%
17	Pemajuan Kemandirian partai-partai dari money politics dan kepentingan yang terselubung	36%
18	Terjaminnya Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut	37%
19	Pemajuan Partisipasi dan akses yang luas dari semua kelompok social, termasuk perempuan, terhadap kehidupan public	37%

### 7.3. Potensi Ancaman Militerisme

Demokrasi sudah hadir kembali di Aceh dan institusi-institusi minimal telah tersedia dan eksis. Semestinya dengan kondisi seperti ini pendekatan-pendekatan dengan menggunakan cara-cara militerisme tidak lagi relevan digunakan di Aceh. Namun suasana kekhawatiran atas jaminan keamanan ternyata masih sulit dihilangkan, di mana menurut sekitar 70% informan kami menyatakan bahwa jaminan kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut masih cukup buruk kinerjanya.

Kondisi ini juga diperburuk pula oleh rendahnya pertanggungjawaban militer dan polisi kepada pemerintahan dan publik, sebanyak 65% informan penelitian ini menyatakan demikian. Termasuk mengenai H/I berkaitan dengan kemampuan pemerintah melawan milisi, premanisme, dan kejahatan terorganisir, sekitar 60% informan kami menyatakan hal itu. Bahkan di wilayah pasangan INDEPENDEN menang, sekitar sekitar 80% informan yang menilai rendahnya upaya untuk mendorong akuntabilitas kepolisian dan militer terhadap otoritas politik dan publik.

Dengan terpilihnya pasangan Irwandi-Nazar dalam pemilihan Gubernur pada Desember lalu, angka-angka ini pada tingkat tertentu, mengindikasikan tingginya tingkat ekspektasi masyarakat kepada pemerintahan terpilih untuk memberikan jaminan keamanan ditengah kondisi buruknya kinerja aparat keamanan selama ini. Ini juga menunjukkan bahwa persoalan keamanan untuk menjaga perdamaian tetap menjadi agenda penting di Aceh. Sementara kinerja berkaitan dengan akses dan kontak langsung masyarakat terhadap layanan publik dan terhadap para wakil politik mereka ternyata kinerjanya buruk oleh 77%. Mungkin hal ini juga menunjukkan bahwa perdamaian yang ada belum benar-benar menyentuh ruhnya di Aceh, diakibatkan oleh buruknya kinerja berkaitan dengan *rule of law* dan jaminan/perbaikan pada hak-hak dasar rakyat.

Sementara persoalan-persoalan keamanan juga menyatu dengan buruknya H/I terkait *good corporate governance*, akuntabilitas dan transparansi birokrasi. Serta independensi partai-partai politik dari politik uang dan kepentingan terselubung di wilayah partai politik nasional menang sebagaimana ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

## 8. Bahaya kolusi modal, birokrasi, dan Partai Politik

Suatu sistem demokrasi yang bekerja dengan baik memiliki prasyarat relatif bebasnya pemerintah dari pengaruh kepentingan spesifik kelompok-kelompok kepentingan yang kuat seperti kelompok pengusaha. Temuan-temuan kami menunjukkan bahwa independensi pemerintah di Aceh masih belum memadai. Para informan penelitian ini mengkonfirmasi buruknya kinerja dan cakupan instrumen untuk mendorong independensi pemerintahan di Aceh. Sekitar 42% informan memberi penilaian demikian. Sementara itu, pada sisi lain, para informan (33%) juga menilai buruknya kinerja H/I demokrasi berkaitan dengan upaya-upaya pemajuan *good corporate governance* yang sesuai dengan kepentingan publik. Tabel 8 menyajikan kondisi beberapa H/I yang berkaitan kinerja modal.

**Tabel 8: H/I Demokrasi yang berkaitan dengan kinerja modal**

No.	Hak/ Institusi Demokrasi	UMUM	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPENDEN	PARTAI POLITIK
1	Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan) yang sesuai dengan kepentingan publik	33%	33%	33%	31%	32%
2	Kemampuan partai untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan public	42%	42%	39%	40%	44%
3	Kemandirian partai-partai dari money politics dan kepentingan kekuasaan besar.	36%	36%	34%	36%	32%
4	Kapasitas pemerintah untuk bebas dari pengaruh berbagai kelompok kepentingan yang kuat, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan	42%	37%	48%	28%	43%

Kekuasaan modal secara umum tidak berdiri sendiri dalam usahanya mengendalikan negara. Kekuasaan mereka lahir dari suatu bentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan kelompok represif, birokrasi, dan politisi busuk. Hingga akhirnya justru kekuasaan modal yang lebih mengontrol kelompok-kelompok kekuatan lainnya. Data kami melihat kemungkinan itu, sekitar 42% informan mengatakan bahwa partai politik lemah dalam merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan vital publik, selain juga partai tidak bebas dari politik uang dan kepentingan terselubung (36%). Demikian pula dengan kemandirian partai politik dari *money politics* dan kepentingan besar.

Pemerintah (26%) dan partai politik (33%) merupakan dua aktor utama yang memiliki posisi kuat dan pengaruh besar pada domain bisnis dan industri. Hal ini juga berlaku pada semua kategori daerah, dengan pengecualian di daerah-daerah dimana INDEPENDEN menang. Pada daerah itu, posisi dan pengaruh kedua aktor ini diimbangi oleh tokoh masyarakat (24%) dan tokoh organisasi masa (16%). Indikasi umum ini menunjukkan bahwa kehidupan bisnis sangat ditentukan pemerintah/partai politik. Dalam situasi dimana H/I demokrasi yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik lemah (lihat tabel 5), maka mudah diduga potensi berlanjutnya pola hubungan yang kolusif antara pengusaha dan politisi/birokrasi tetap besar di Aceh.

**Tabel 9 : Wilayah Gerakan Aktor Utama pada sektor bisnis**

Aktor \ Wilayah Gerakan	BISNIS DAN INDUSTRI				
	UMUM	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPENDEN	PARTAI POLITIK
Pemerintah/Birokrasi	26%	33%	20%	25%	31%
LSM/Aktivis LSM	7%	7%	7%	4%	7%
Partai Politik	29%	23%	35%	12%	35%
Tokoh Keagamaan	1%	0%	2%	0%	0%
Akademisi, pengacara, guru/dosen, kaum profesional	3%	4%	2%	6%	4%
Tokoh Organisasi Massa	12%	8%	15%	16%	7%
Pengusaha/Industrialis	15%	19%	11%	12%	8%
Aktivis Gerakan Buruh/Nelayan/Petani	0%	0%	0%	2%	0%
Tokoh masyarakat	7%	6%	9%	24%	8%

Di ranah usaha kecil, posisi dan pengaruh besar ornop lebih menentukan dibanding aktor-aktor utama lainnya. Berbeda dengan ranah bisnis dan industri dimana tidak lebih dari 10% informan beranggapan bahwa pengaruh aktor ini besar, di ranah usaha kecil dua kali lipat informan berpendapat pengaruh mereka besar, melampaui aktor-aktor lain.

**Tabel 10 : Wilayah Gerakan Aktor Utama pada sektor usaha kecil**

WILAYAH GERAKAN	USAHA KECIL				
	UMUM	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPENDEN	PARTAI NASIONAL
Pemerintah/Birokrasi	16%	21%	11%	14%	27%
LSM/ Aktivis LSM	22%	23%	22%	24%	20%
Partai Politik	19%	16%	22%	14%	19%
Tokoh Keagamaan	15%	8%	22%	3%	10%
Akademisi/ pengacara, guru/dosen, kaum profesional	2%	2%	3%	0%	3%
Tokoh Organisasi Massa	7%	5%	8%	10%	3%
Pengusaha/Industrialis	5%	6%	3%	7%	4%
Aktivis Serikat Buruh/Nelayan/Petani	2%	3%	0%	7%	0%
Tokoh masyarakat	12%	16%	8%	21%	14%

Tabel 20 menunjukkan dominasi para politisi (35%) dan pemerintah (24%) dalam penguasaan sumber-sumber kekuasaan ekonomi. Kondisi semacam ini cenderung merata terjadi di berbagai kategori wilayah yang diteliti. Selain kedua aktor utama tersebut, tokoh pada organisasi massa menurut para informan saat ini cukup menguasai sumber kekuasaan ekonomi (11%). Hal ini sekaligus mengindikasikan dalam perebutan sumber kekuasaan ekonomi di Aceh ada semacam kompetisi baru antara pemerintah (birokrasi baik sipil maupun militer), para politisi, dengan para tokoh organisasi massa. Terkecuali di wilayah partai politik menang dimana sumber-sumber kekuasaan ekonomi tetap didominasi oleh birokrasi dan partai politik.

Tabel 11 : Sumber kekuasaan ekonomi Aktor Utama

AKTOR UTAMA	UMUM	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPENDEN	PARTAI POLITIK
Pemerintah/Birokrasi	24%	27%	22%	27%	24%
LSM/Aktivis LSM	6%	7%	4%	9%	7%
Partai Politik	35%	37%	32%	33%	37%
Tokoh Keagamaan	7%	5%	10%	1%	8%
Akademisi/ pengacara, guru/dosen, kaum profesional	3%	3%	2%	4%	3%
Tokoh Organisasi Massa	11%	9%	13%	13%	8%
Pengusaha/Industrialis	9%	9%	10%	9%	7%
Aktivis Serikat Buruh/Nelayan/Petan	0%	0%	0%	1%	0%
Tokoh masyarakat	5%	2%	8%	2%	7%

## 9. Aktor Utama dan Demokrasi

Aktor yang memiliki posisi dan pengaruh besar dalam politik di Aceh saat ini didominasi oleh kalangan politisi (22%) dan pemerintah/birokrasi (18%), yaitu dua kelompok aktor yang selama ini cenderung menggunakan sekaligus menyalahgunakan demokrasi. Tokoh agama (10%) dan pengusaha (10%) tampaknya oleh informan penelitian ini dianggap tidak terlalu berpengaruh. Aktivis ornop (14%) dianggap lebih berpengaruh dibanding kedua aktor tersebut. Di daerah-daerah Lhokseumawe (15%), Takengon (13%), Tapaktuan (17%) dan Meulaboh (23%) dan sekitarnya aktivis ornop dianggap dapat mengimbangi pengaruh politisi dan birokrasi. Khusus di Banda Aceh dan sekitarnya, kalangan pengusaha dianggap memainkan peran dan pengaruh besar dalam politik (26%), melampaui aktor-aktor utama lainnya.

Penting dicatat bahwa pengaruh organisasi-organisasi berbasis masa dianggap tidak signifikan oleh informan. Salah satu dugaan adalah karena massa memang tidak terorganisasi berdasarkan kepentingan melainkan berdasarkan teritori. Jika dugaan ini benar, maka keterwakilan kepentingan vital masyarakat di masa yang akan datang terancam.

Tabel 12: Aktor yang mempunyai peran dan pengaruh penting dalam politik (umum dan tujuh satuan wilayah)

Kategori Tokoh	Umum	Banda Aceh	Lhokseumawe	Langsa	Take ngon	Kuta cane	Meula boh	Tapak Tuan
1 Pemerintah/Birokrasi	18%	10%	17%	23%	24%	17%	13%	20%
2 NGO/Aktivis NGO	14%	8%	15%	13%	13%	6%	23%	17%
3 Partai Politik/Anggota Legislatif (daerah/propinsi)	22%	17%	22%	15%	23%	34%	31%	14%
4 Tokoh Agama	10%	10%	8%	11%	9%	19%	8%	6%
5 Akademisi, pengacara, guru,	5%	7%	8%	6%	0%	3%	2%	11%

	professional								
6	Tokoh Organisasi Massa	12%	14%	9%	16%	13%	12%	10%	10%
7	Pengusaha	10%	26%	14%	5%	6%	1%	8%	10%
8	Aktivis serikat buruh/nelayan/petani /pedagang	2%	0%	4%	7%	0%	0%	5%	0%
9	Tokoh Masyarakat	7%	8%	3%	2%	11%	9%	1%	13%

Dari aktor-aktor utama ini hampir separuh informan menganggap aktor-aktor utama ini sebagai “pengguna dan promotor” demokrasi (49%) daripada “penyalahguna’ demokrasi (8%). Dilihat dari jumlah aktor utama yang menghindari (8%) aturan-aturan demokrasi, baik formal maupun non formal, tampaknya sistem demokrasi dapat diterima sebagai aturan main bersama. Penting dicatat, aktor yang dianggap hanya menggunakan, yang berarti pula berpotensi untuk turut mempromosikan tapi juga menyalahgunakan, secara umum mencapai seperempat dari aktor utama.

**Tabel 13 : Relasi Aktor utama dengan H/ I Demokrasi**

Bagaimana Aktor Utama menggunakan berbagai aturan, baik formal maupun non-formal, yang berlaku di Aceh?

No.	RELASI	UMUM	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPENDEN	PARPOL
1	Pengguna dan promotor	49%	61%	37%	44%	54%
2	Pengguna	27%	30%	25%	34%	21%
3	Penyalahguna	8%	5%	11%	9%	7%
4	Pengabai	16%	4%	27%	13%	18%

### 9.1. Wilayah Gerakan dan Sumber Kekuasaan

Secara umum wilayah gerakan hampir di semua tempat menjadi dominasi para birokrat dan partai politik. Namun terdapat beberapa varian yang meski tidak terlalu signifikan perbedaannya, tetap menarik untuk diamati. Di ranah bisnis/industri misalnya, munculnya aktor utama dari organisasi massa di wilayah INDEPENDEN menang menunjukkan bahwa para tokoh organisasi massa dan tokoh masyarakat menganggap penting untuk menguasai ranah tersebut.

**Tabel 14: Ranah Bisnis dan Industri**

AKTOR/ WILAYAH GERAKAN	BISNIS DAN INDUSTRI				
	UMUM	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPENDEN	PARTAI NASIONAL
Pemerintah/Birokrasi (sipil/militer)	26%	33%	20%	25%	31%
LSM/ Aktivistis LSM	7%	7%	7%	4%	7%
Partai Politik	29%	23%	35%	12%	35%
Tokoh Keagamaan	1%	0%	2%	0%	0%
Akademisi/ pengacara, guru/dosen, kaum profesional	3%	4%	2%	6%	4%
Tokoh Organisasi Massa	12%	8%	15%	16%	7%
Pengusaha/Industrialis	15%	19%	11%	12%	8%
Aktivistis Serikat Buruh/Nelayan/Petani	0%	0%	0%	2%	0%
Tokoh masyarakat	7%	6%	9%	24%	8%

Sementara itu aktivis ornop dan politisi adalah actor utama yang paling mendominasi ranah publik. Namun di daerah dimana pasangan Irwandi-Nazar kalah, ranah lobi ini justru didominasi oleh tokoh organisasi massa (21%) disamping politisi (19%).

**Tabel 15 : Ranah Kelompok Lobi**

AKTOR/ WILAYAH GERAKAN	KELOMPOK LOBI				
	UMUM	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPENDEN	PARTAI POLITIK
Pemerintah/Birokrasi (sipil/militer)	14%	14%	15%	13%	14%
LSM/ Aktivistis LSM	19%	24%	14%	23%	18%
Partai Politik	19%	20%	19%	17%	24%
Tokoh Keagamaan	9%	9%	10%	11%	6%
Akademisi/ pengacara, guru/dosen, kaum profesional	8%	10%	7%	8%	11%
Tokoh Organisasi Massa	16%	10%	21%	13%	15%
Pengusaha/Industrialis	4%	2%	7%	1%	3%
Aktivistis Serikat Buruh/Nelayan/Petani	1%	1%	0%	2%	0%
Tokoh masyarakat	9%	11%	8%	12%	9%

Di ranah 'kelompok kepentingan' secara umum didominasi oleh politisi (20%) dan tokoh ormas (20%). Hal ini tidak berlaku di daerah dimana IRNA menang. Karena, di daerah tersebut aktivis/organisasi non pemerintah lebih besar pengaruhnya pada kelompok-kelompok kepentingan. Sementara itu tokoh-tokoh ormas lebih memiliki pengaruh dalam ranah ini, pada daerah-daerah dimana IRNA kalah (29%) dan partai nasional menang (18%).

**Tabel 16: Ranah Kelompok Kepentingan**

AKTOR/ WILAYAH GERAKAN	KELOMPOK KEPENTINGAN				
	UMUM	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPENDEN	PARTAI NASIONAL
Pemerintah/Birokrasi	16%	16%	15%	13%	19%
LSM/ Aktivis LSM	13%	20%	6%	18%	15%
Partai Politik	20%	16%	24%	19%	20%
Tokoh Keagamaan	13%	16%	11%	13%	11%
Akademisi/ pengacara, guru/dosen, kaum profesional	6%	6%	5%	5%	8%
Tokoh Organisasi Massa	20%	12%	29%	14%	18%
Pengusaha/Industrialis	3%	2%	3%	3%	3%
Aktivis Serikat Buruh/Nelayan/Petani	1%	2%	0%	3%	0%
Tokoh masyarakat	8%	10%	6%	13%	6%

Sementara ranah politik formal masih didominasi oleh aktor-aktor utama tradisional (birokrat dan politisi). Keberadaan tokoh organisasi massa justru memperlihatkan eksistensi pengaruhnya di ranah ini pada daerah-daerah dimana pasangan Irwandi-Nazar kalah dan partai politik menang.

**Tabel 17 : Ranah Pemerintahan Lokal Terpilih**

AKTOR/ WILAYAH GERAKAN	PEMERINTAH LOKAL TERPILIH				
	UMUM	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPENDEN	PARTAI NASIONAL
Pemerintah/Birokrasi	22%	17%	27%	11%	32%
LSM/ Aktivis LSM	11%	11%	11%	17%	6%
Partai Politik	21%	22%	19%	26%	21%
Tokoh Keagamaan	11%	14%	8%	14%	6%
Akademisi/ pengacara, guru/dosen, kaum profesional	5%	5%	5%	4%	7%
Tokoh Organisasi Massa	18%	15%	21%	8%	20%
Pengusaha/Industrialis	3%	2%	3%	1%	1%
Aktivis Serikat Buruh/Nelayan/Petani	1%	1%	0%	2%	0%
Tokoh masyarakat	10%	14%	6%	17%	7%

Dapat pula dikatakan ada kecenderungan bahwa di luar dua actor utama (birokrasi dan politisi), ornop dan aktivisnya memiliki posisi dan pengaruh kuat di daerah-daerah dimana IRNA menang. Sedangkan tokoh-tokoh ormas memiliki posisi dan pengaruh kuat di daerah dimana partai nasional menang. Hal ini mungkin dapat menjelaskan basis dukungan bagi kedua kelompok politik ini.

Sumber-sumber kekuasaan sebagian besar dikuasai oleh pemerintah dan partai politik. Hal ini berlaku baik secara umum maupun pada semua kategori daerah yang dicakup oleh



penelitian ini. Kecuali untuk sumber kekuasaan informasi dan pengetahuan. Ornop masih mengandalkan sumber kekuasaannya pada informan dan pengetahuan.

**Tabel 18: Sumber Kekuatan Ekonomi**

AKTOR / SUMBER KEKUASAAN	Kekuatan Ekonomi				
	UMUM	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPENDEN	PARTAI POLITIK
Pemerintah/Birokrasi	24%	27%	22%	27%	24%
LSM/ Aktivis LSM	6%	7%	4%	9%	7%
Partai Politik	35%	37%	32%	33%	37%
Tokoh Keagamaan	7%	5%	10%	1%	8%
Akademisi/ pengacara, guru/dosen, kaum profesional	3%	3%	2%	4%	3%
Tokoh Organisasi Massa	11%	9%	13%	13%	8%
Pengusaha/Industrialis	9%	9%	10%	9%	7%
Aktivis Serikat Buruh/Nelayan/Petani	0%	0%	0%	1%	0%
Tokoh masyarakat	5%	2%	8%	2%	7%

**Tabel 19: Sumber Kekuatan Politik, Massa, dan Koersi Militer**

AKTOR / SUMBER KEKUASAAN	Kekuatan Politik, Massa, Koersi Militer				
	UMUM	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPENDEN	PARTAI POLITIK
Pemerintah/Birokrasi	18%	15%	21%	13%	21%
LSM/ Aktivis LSM	11%	16%	7%	15%	12%
Partai Politik	28%	25%	31%	28%	28%
Tokoh Keagamaan	10%	12%	9%	11%	7%
Akademisi/ pengacara, guru/dosen, kaum profesional	3%	5%	1%	6%	5%
Tokoh Organisasi Massa	19%	14%	23%	11%	20%
Pengusaha/Industrialis	4%	4%	3%	3%	2%
Aktivis Serikat Buruh/Nelayan/Petani	1%	1%	0%	3%	0%
Tokoh masyarakat	6%	8%	4%	11%	6%

**Tabel 20 : Sumber Kekuatan Sosial dan Jaringan**

AKTOR / SUMBER KEKUASAAN	Kekuatan Sosial dan Jaringan				
	UMUM	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPENDEN	PARTAI POLITIK
Pemerintah/Birokrasi	16%	16%	17%	13%	20%
LSM/ Aktivis LSM	13%	16%	10%	17%	12%
Partai Politik	24%	23%	25%	23%	25%
Tokoh Keagamaan	13%	11%	15%	12%	11%
Akademisi/ pengacara, guru/dosen, kaum profesional	5%	6%	5%	7%	7%
Tokoh Organisasi Massa	16%	13%	18%	12%	15%

Pengusaha/Industrialis	3%	4%	3%	4%	2%
Aktivis Serikat Buruh/Nelayan/Petani	1%	1%	0%	3%	0%
Tokoh masyarakat	9%	9%	8%	11%	9%

Tabel 21 : Sumber Kekuatan Pengetahuan dan Informasi

AKTOR / SUMBER KEKUASAAN	Pengetahuan dan Informasi				
	UMUM	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPENDEN	PARTAI POLITIK
Pemerintah/Birokrasi	19%	17%	22%	12%	25%
LSM/ Aktivis LSM	16%	19%	14%	19%	16%
Partai Politik	22%	20%	24%	21%	20%
Tokoh Keagamaan	11%	11%	12%	12%	9%
Akademisi/ pengacara, guru/dosen, kaum profesional	8%	9%	6%	9%	11%
Tokoh Organisasi Massa	12%	12%	13%	9%	12%
Pengusaha/Industrialis	2%	2%	2%	2%	2%
Aktivis Serikat Buruh/Nelayan/Petani	1%	1%	0%	3%	0%
Tokoh masyarakat	8%	9%	7%	13%	6%

## 9.2. Tempat Pengaduan

Dari tabel di bawah tampak bahwa media massa (19%) dan Ornop (24%) masih menjadi dua tempat pengaduan utama masyarakat sebagaimana ditampilkan pada tabel 22 di bawah. Hal ini berlaku di semua kategori daerah yang dicakup dalam penelitian ini. Kecenderungan ini konsisten dengan temuan sebelumnya dimana mayoritas informan menilai kinerja institusi-institusi representasi buruk sebagaimana dipaparkan pada bab 5 di atas. Terutama masih belum adanya partai politik lokal yang menurut sebagian besar informan menjadi pilihan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya sebagaimana dipaparkan pada bab 6 dalam laporan penelitian ini.

Tabel 22 : Tempat Pengaduan Masyarakat

INSTITUSI	UMUM	IRNA MENANG	IRNA KALAH	INDEPENDEN	PARTAI POLITIK
Media Massa	19%	18%	20%	16%	21%
LSM	24%	25%	23%	26%	23%
Kelompok penekan atau kelompok lobi	12%	13%	12%	14%	11%
Kelompok Kepentingan	2%	2%	2%	3%	1%
Partai Politik	3%	3%	2%	3%	2%
Politisi/pejabat pemerintah hasil pemilihan di berbagai tingkatan	6%	7%	6%	6%	7%
pejabat birokrasi di berbagai tingkatan	4%	4%	4%	6%	2%
Lembaga semi-pemerintah seperti Komnas-HAM, KPK, KPU dan Ombudsman	4%	4%	5%	6%	2%
Lembaga Penegak Hukum	10%	10%	11%	9%	11%
Tokoh-tokoh Informal	15%	15%	15%	10%	20%

# BAGIAN III

## 10. Kesimpulan

Penelitian ini memperlihatkan lima kesimpulan pokok atas masalah-masalah dan pilihan-pilihan demokrasi berbasis hak asasi manusia di Aceh, agar menjadi bermakna:

### I Aceh: Masyarakat Sadar Politik (*politicised society*)

Berbeda dengan kecenderungan tingkat nasional, [Demos, 2004], penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Aceh merupakan *masyarakat sadar politik*. Masyarakat yang dari kesadaran maupun minatnya siap untuk terlibat dalam politik. Politik bukan pertama-tama diartikan sebagai urusan ‘kaum elit’ melainkan perjuangan untuk merebut kekuasaan (37%) atau sebagai kontrol rakyat atas urusan publik (36%). Jumlah ini semakin tinggi di daerah-daerah dimana Irwandi-Nazar dan kandidat independen menang. Disamping itu, lebih dari 80% informan menyatakan adanya minat masyarakat pada politik. Kecenderungan ini juga berlaku pada perempuan Aceh.

Sebagai wadahnya, hampir 2 dari 3 informan beranggapan bahwa partai politik lokal adalah pilihan mereka jika [kelak] terlibat dalam proses politik formal. Kecenderungan umum itu diperkuat dengan tingginya pilihan pada partai politik lokal di daerah-daerah dimana partai politik nasional memenangkan pilkada (70%). Di daerah yang sama hanya 1 dari 20 orang memilih partai nasional sebagai wadah keterlibatan politik.

Dengan kondisi demikian maka potensi mengembangkan demokrasi yang bermakna semakin besar. Karena seperti diuraikan pada bagian 1, demokrasi akan bermakna jika masyarakat luas (dan bukan hanya elite) bersedia dan mampu mendorong serta menggunakannya. Persoalannya terletak pada potensi untuk melakukannya (yang sayangnya belum dapat dipaparkan dalam laporan awal ini). Meski demikian laporan awal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan beranggapan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat Aceh jika ingin mendorong keterlibatan mereka dalam proses politik formal.

Hal ini juga berlaku pada perempuan di Aceh. Tidak kurang dari separuh informan yang beranggapan bahwa pilihan yang terbaik adalah dengan cara meningkatkan kapasitas politik perempuan. Hanya 14% yang beranggapan bahwa peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik harus dilakukan dengan memberi dukungan pada perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Lebih kecil lagi yang beranggapan pentingnya promosi kuota untuk mendorong keterlibatan perempuan.

## II Kuatnya Identitas Kewargaan Aceh.

Hampir separuh dari informan penelitian ini mengungkapkan masyarakat yang bekerja dengan mereka mengidentifikasi diri sebagai “warga Aceh” (kabupaten, kota, atau propinsi) dan 25% mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas desa/suku/etnis. Sementara itu, hanya satu (1) dari sekitar 20 orang yang menyatakan bahwa masyarakat mengidentifikasi diri mereka sebagai komunitas agama.

Kuatnya kecenderungan mengidentifikasi diri sebagai warga Aceh melampaui identitas-identitas lainnya: etnis, agama, kelas sosial, dan warga Indonesia dapat diartikan dalam beberapa cara. *Pertama*, orang Aceh lebih merasa sebagai bagian dari sebuah entitas politik yang bernama Aceh dan bukan semata-mata “suku bangsa” Aceh. *Kedua*, ini mungkin menjadi isyarat dari tumbuhnya rasionalitas politik di kalangan masyarakat setelah puluhan tahun, politik tampak sebagai sesuatu yang tidak logis.

Kendati terlihat sinyal yang jelas bagi berkembangnya rasionalitas politik di Aceh, namun tidak bisa diinterpretasikan bahwa apa yang disebut dengan istilah “politik perkauman” telah sama sekali hilang dari tingkah laku politik masyarakat pemilih di Aceh. Apa yang bisa kita katakan tentang hal ini adalah bahwa politik perkauman, setidaknya, di tingkat propinsi tidak lagi dominan seperti yang selama ini dibayangkan oleh para pengamat dan politisi.

Kegagalan membaca pergeseran tingkah laku politik ini diduga menjadi salah satu penyebab kegagalan partai politik nasional memenangkan bursa pemilihan Gubernur pada Pilkada lalu. Berbeda dengan kandidat Irwandi-Nazar, partai-partai politik pun tampak masih mengandalkan strategi politik berbasis perkauman yang terlihat dari cara mereka membuat kalkulasi atas pengajuan calon kandidat di dalam Pilkada. Ketimbang menawarkan program-program yang lebih realistis, partai-partai sibuk mencari titik temu asal-usul daerah, keturunan, dan suku dari kandidat yang akan mereka perjuangkan.

Data kami menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan yang agak berbeda di antara kelompok daerah Irwandi-Nazar dan GAM menang dengan daerah dimana partai politik menang. Pada kelompok daerah pertama, selisih di antara mereka yang pertama-tama mengidentifikasi diri sebagai warga Aceh dengan warga etnis tampak cukup besar. Artinya, kecenderungan mengidentifikasi diri sebagai warga Aceh terlihat lebih menonjol di daerah-tersebut dibanding dengan di kelompok daerah lainnya.

## III Demokrasi di Tengah Ancaman Kembalinya Militerisme.

Pengalaman berdemokrasi di Aceh semakin menunjukkan anggapan bahwa sistem demokrasi tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia, semakin tidak beralasan. Semakin luas ruang politik semakin tinggi pemanfaatan institusi demokrasi. Meskipun eksistensi hak/institusi demokrasi masih terbatas, terutama pada kebebasan sipil, hampir separuh informan (49%) beranggapan bahwa aktor-aktor utama; yang mempunyai pengaruh yang

kuat dan posisi yang menentukan dalam demokrasi, cenderung menggunakan dan mendorong demokrasi (*use and promote*). Walaupun terdapat pilihan untuk menghindari demokrasi jumlah itu kecil (16%). Kecenderungan ini terjadi bukan saja secara umum di Aceh, akan tetapi juga di daerah-daerah dimana Irna menang (61%) dan partai nasional menang (54%).

Hal ini diperkuat dengan tingginya pemahaman dan minat berpolitik masyarakat Aceh. Penelitian ini menunjukkan indikasi kuat untuk memberi pilihan lebih pada partai politik (67%) – terutama partai politik lokal – dan bukan non-partai politik (hanya 28%) sebagai pilihan untuk terlibat dalam proses politik. Besarnya kecenderungan untuk membangun dan bergabung dengan sebuah partai politik [lokal] mengisyaratkan tumbuhnya optimisme politik di kalangan masyarakat untuk menggunakan mekanisme formal demokrasi (partai politik) sebagai cara untuk mempengaruhi proses politik. Mereka memang selama ini telah kehilangan kepercayaan terhadap partai politik yang ada, tetapi tidak terhadap kerangka demokrasi di Aceh.

Dengan kata lain, sistem demokrasi yang selama beberapa dekade dihambat oleh militerisme kembali diterima sebagai ‘aturan main’ bersama. Hal ini ditandai dengan beralihnya penggunaan kekuatan senjata kepada cara persaingan melalui pemilu (dari peluru menjadi suara). Meskipun demikian, berlakunya sistem demokrasi di Aceh tetap dibayangi oleh kembalinya militerisme. Penelitian ini menunjukkan bahwa institusi demokrasi yang berhubungan dengan pertanggungjawaban militer dan polisi pada pemerintah terpilih dan publik atau supremasi sipil masih rendah (30%). Demikian pula dengan kinerja dan cakupan institusi demokrasi yang berhubungan dengan kemampuan pemerintah melawan milisi, premanisme, dan kejahatan terorganisir tidak lebih dari 40%.

#### **IV Ancaman kolusi kekuasaan modal, birokrasi, dan partai politik terhadap sendi-sendi demokrasi.**

Para informan penelitian ini mengkonfirmasi buruknya kinerja dan cakupan instrumen untuk mendorong independensi pemerintahan di Aceh. Sekitar 42% informan memberi penilaian demikian. Sementara itu, tidak kurang dari 1/3 informan menilai kinerja H/I demokrasi yang berkaitan dengan upaya-upaya pemajuan *good corporate governance* buruk.

Kekuasaan modal secara umum tidak berdiri sendiri dalam usahanya mengendalikan negara. Kekuasaan mereka lahir dari suatu bentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan kelompok represif, birokrasi, dan politisi busuk. Hingga akhirnya justru kekuasaan modal yang lebih mengontrol kelompok-kelompok kekuatan lainnya. Data kami melihat kemungkinan itu, sekitar 42% informan mengatakan bahwa partai politik lemah dalam merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan vital publik, selain juga partai tidak bebas dari politik uang dan kepentingan terselubung (36%). Demikian pula dengan kemandirian partai politik dari *money politics* dan kepentingan besar.

Pemerintah (26%) dan partai politik (33%) merupakan dua aktor utama yang memiliki posisi kuat dan pengaruh besar pada domain bisnis dan industri. Hal ini juga berlaku pada semua kategori daerah, dengan pengecualian di daerah-daerah dimana GAM menang. Pada daerah itu, posisi dan pengaruh kedua aktor ini diimbangi oleh tokoh masyarakat (24%) dan tokoh organisasi masa (16%). Dalam situasi dimana H/I demokrasi yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik lemah, maka mudah diduga potensi berlanjutnya pola hubungan yang kolusif antara pengusaha dan politisi/birokrasi tetap besar di Aceh.

Data penelitian ini juga menunjukkan dominasi para politisi (35%) dan pemerintah (24%) dalam penguasaan sumber-sumber kekuasaan ekonomi. Kondisi semacam ini cenderung merata terjadi di berbagai kategori wilayah yang diteliti. Selain kedua aktor utama tersebut, tokoh pada organisasi massa menurut para informan saat ini cukup menguasai sumber kekuasaan ekonomi (11%). Hal ini sekaligus mengindikasikan dalam perebutan sumber kekuasaan ekonomi di Aceh ada semacam kompetisi baru antara pemerintah (birokrasi baik sipil maupun militer), para politisi, dengan para tokoh organisasi massa. Terkecuali di wilayah partai politik menang dimana sumber-sumber kekuasaan ekonomi tetap didominasi oleh birokrasi dan partai politik.

## **V. Basis masa belum terorganisasi secara politis.**

Meski masyarakat Aceh merupakan '*masyarakat sadar politik*' terdapat kecenderungan di semua kategori wilayah akan belum terorganisasinya basis masa secara politis. Proses politik masih didominasi oleh aktor-aktor politik yaitu kalangan politisi (22%) dan pemerintah/birokrasi (18%), dua kelompok aktor yang selama ini cenderung bukan hanya menggunakan tapi sekaligus menyalahgunakan demokrasi. Sementara pengaruh organisasi-organisasi berbasis masa dianggap tidak signifikan oleh informan. Sejalan dengan itu identitas berbasis kelas juga tidak signifikan. Salah satu dugaan adalah karena massa memang tidak terorganisasi berdasarkan kepentingan melainkan berdasarkan teritori. Jika dugaan ini benar, maka keterwakilan kepentingan vital masyarakat (terutama masyarakat marginal) di masa yang akan datang terancam.

Dominasi kedua aktor utama itu dalam proses politik hampir di semua ranah gerakan. Namun terdapat beberapa varian yang meski tidak signifikan tetap menarik untuk diamati. Ornop dan aktivisnya memiliki posisi dan pengaruh kuat di daerah-daerah dimana IRNA menang. Sedangkan tokoh-tokoh ormas (organisasi masyarakat) memiliki posisi dan pengaruh kuat di daerah dimana partai nasional menang. Hal ini sekaligus menjelaskan basis dukungan bagi kedua kelompok politik ini.

Kedua aktor ini juga menguasai hampir semua jenis sumber kekuasaan, baik secara umum maupun pada semua 'kategori daerah'. Sementara itu ornop masih mengandalkan sumber kekuasaan 'tradisional' pada informasi dan pengetahuan. Meski demikian baik ornop maupun media masa menjadi dua tempat pengaduan utama masyarakat. Hal ini konsisten dengan temuan sebelumnya dimana mayoritas informan menilai kinerja institusi-institusi representasi buruk dan pilihan partai politik lokal sebagai wadah

ekspresi politik mereka (yang hingga kini belum berfungsi). Dengan kata lain, jika partai politik lokal mulai bekerja dengan benar maka besar kemungkinan ornop tidak lagi menjadi tempat pengaduan utama.

## **Rekomendasi**

Bedasarkan temuan-temuan awal tersebut di atas maka penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut untuk terjadinya proses demokrasi yang bermakna, yaitu:

1. Melihat pengalaman demokrasi di Aceh menunjukkan bahwa terbukanya kandidat independen (di luar kandidat partai politik) meningkatkan potensi keterlibatan masyarakat dalam proses politik, maka direkomendasikan agar kandidat independen dimungkinkan dalam pemilihan umum di bagian wilayah Indonesia lainnya.
2. Dengan ditunjukkannya bahwa proses demokrasi termasuk keterlibatan warga dalam politik semakin subur ketika ruang politik bebas dari tekanan militeristik, maka komando teritorial di Aceh harus dihapuskan.
3. Pengembangan organisasi berbasis massa secara politis perlu ditingkatkan.

# BAGIAN IV

## Lampiran 1

### 40 instrumen demokrasi

#### Hak-hak dan institusi-institusi yang perlu dipromosikan:

##### **I: Kewarganegaraan, hukum dan hak-hak**

1. Kesetaraan warga negara
2. Hak-hak minoritas, migran dan pengungsi
3. Hak-hak korban (konflik dan bencana alam)
4. Rekonsiliasi
5. Reintegrasi
6. Dukungan pemerintah dan penghargaan terhadap hukum internasional dan ketentuan HAM PBB
7. Kepatuhan aparatur penyelenggara kekuasaan Negara terhadap hukum
8. Akses yang setara dan aman terhadap keadilan
9. Integritas & independensi lembaga peradilan (P4P, P4D, PTUN, Pengadilan Agama, dll)
10. Kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut
11. Kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat/berorganisasi
12. Kebebasan mendirikan dan menjalankan kegiatan-kegiatan serikat buruh
13. Kebebasan beragama dan berkeyakinan
14. Kebebasan menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan
15. Kesetaraan dan emansipasi jender
16. Perlindungan terhadap hak-hak anak
17. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, memperoleh jaminan sosial, dan kebutuhan dasar lainnya
18. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar
19. *Good corporate governance* (tatakelola perusahaan yang baik) dan regulasi bisnis sesuai dengan kepentingan publik

##### **II: Pemerintahan yang representatif dan akuntabel**

20. Pemilihan Umum yang bebas dan adil di tingkat pusat, regional, dan lokal secara serentak (Pemilihan pada waktu yang sama untuk memilih DPR, DPR Provinsi, dan Kabupaten/Kota, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden)
21. Pemilihan Kepala Daerah yang bebas dan adil (Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati/Walikota secara serentak)
22. Kebebasan mendirikan partai, merekrut anggota, dan mengkampanyekan calon-calon untuk menduduki kekuasaan pemerintahan
23. Kemampuan partai politik untuk merefleksikan isu-isu vital dan kepentingan publik
24. Pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol, doktrin agama atau etnis oleh partai politik
25. Independensi partai-partai politik dari politik uang dan kepentingan yang terselubung
26. Kapasitas kontrol anggota dan simpatisan kepada partainya, serta respon dan tanggungjawab partai politik terhadap konstituennya
27. Kemampuan partai untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan
28. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah hasil pemilihan, pada semua tingkatan
29. Transparansi dan akuntabilitas birokrasi, pada semua tingkatan
30. Desentralisasi pemerintahan secara demokratis
31. Transparansi & pertanggungjawaban militer & kepolisian kepada pemerintah terpilih dan publik
32. Kapasitas pemerintah untuk memberantas kelompok-kelompok paramiliter, preman dan kejahatan terorganisir
33. Independensi pemerintah dari pengaruh berbagai kelompok kepentingan yang kuat dan adanya kapasitas untuk menghapuskan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan



**III: Masyarakat sipil yang berorientasi demokratis**

34. Jaminan kebebasan pers, dunia seni, dan dunia akademis
35. Akses publik terhadap berbagai pandangan dalam media, seni, dan dunia akademis, juga untuk merefleksikannya
36. Partisipasi warga negara dalam organisasi-organisasi masyarakat yang independen
37. Transparansi, akuntabel, dan praktek demokratis/tidaknya organisasi-organisasi masyarakat sipil
38. Akses dan partisipasi yang luas dari semua kelompok sosial – termasuk perempuan – terhadap kehidupan publik
39. Terbukanya akses dan kontak langsung masyarakat terhadap layanan publik dan terhadap para wakil politik mereka
40. Konsultasi pemerintah dengan masyarakat, dan bila mungkin, adanya partisipasi publik secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan publik